

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN
PEMODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA
PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN ASAHAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Memperoleh Gelar Magister
Akuntansi Dalam Bidang Akuntansi
Sektor Publik*

Oleh :

WINDI TRIANA

NPM : 1820050033



**PROGRAM STUDI MAGISTER
AKUNTANSI PROGRAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA M E D A N
2020**

PENGESAHAN TESIS

NAMA : **WINDI TRIANA**
NPM : 1820050033
PRODI : **MAGISTER AKUNTANSI**
KONSENTRASI : **AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**
JUDUL TESIS : **PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DENGAN PEMODERASI SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN
ASAHAN**

Pengesahan Tesis :
Medan, 29 Agustus 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak, M.Si, CA

Pembimbing II



Dr. Prawidya Hariani, S.E., M.Si

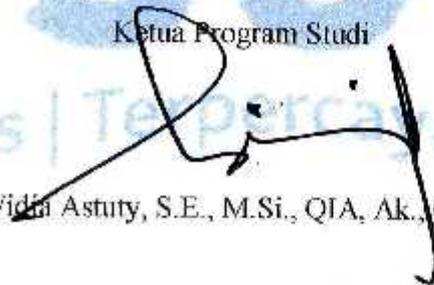
Diketahui

Direktur



Dr. Syaiful Bahri, M.AP

Ketua Program Studi



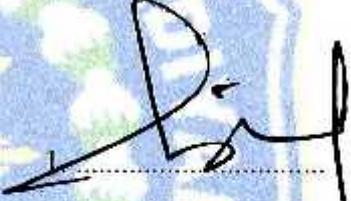
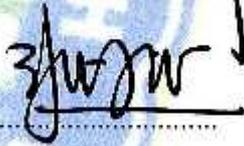
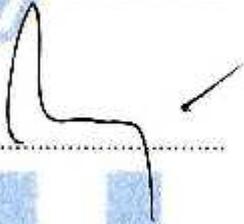
Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA

PENGESAHAN

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN
PEMODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN ASAHAN**

"Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji
Yang Dibentuk Oleh Magister Akuntansi PPs, UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam
Ujian, Pada Hari Sabtu, Tanggal 29 Agustus 2020

Panitia Penguji

1. Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA, CPA 1. 
Ketua
2. Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak, M.Si, CA 2. 
Sekretaris
3. Dr. Prawidya Hairani S.E., M.Si 3. 
Anggota
4. Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si, CA 4. 
Anggota
5. Dr. Bastari M., S.F., M.M, BKP 5. 
Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN PEMODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN ASAHAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan,

2020



**THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING INFORMATION
SYSTEMS ON THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS WITH
MODERATING INTERNAL CONTROL SYSTEMS
IN VILLAGE GOVERNMENT
IN ASAHAN DISTRICT**

**Windi Triana
NPM. 1820050033**

ABSTRACT

The aim of this research is to find out how much influence the application of accounting information systems has on the quality of financial reports by moderating the internal control system in village government in Asahan Regency. This research uses associative quantitative methods using an empirical approach to determine primary data in the field by collecting data using research instruments . The study population was the entire Peme 's instructions in Asahan Village. The sample of this research is 54 villages with 108 respondents. The data analysis technique used in this research is the *Structure Equation Model (SEM)* based method *Partial Least Square (PLS)* . The results showed that the effect of the application of the accounting information system on the quality of financial reports by moderating the internal control system in the village government in Asahan Regency, based on the indicators is as follows: First, the application of the accounting information system has a positive and significant effect on the quality of financial reports, which means that there are application of an accounting information system, then the quality of the Village Government financial reports presented will be better . Second, s ystem of internal control is not able to moderate the effect of the application of accounting information system terh adap quality of financial statements, it indicates that the internal control system was not significant in affecting the relationship between the application of accounting information systems with the quality of financial statements , which means that the internal control system can not be go according to what you want. For it is expected that the entire village should receive special training, especially regarding the implementation of the financial information system of the village (Siskeudes) and s ebaiknya internal control system in the village administration in Asahan must be applied more good again because control system that will better me minimize the possibility of head village or village apparatus to do something that is not in accordance with their functions and responsibilities.

Keywords: *S ystem Information Accounting, Internal Control Systems, Quality of Financial Statements*

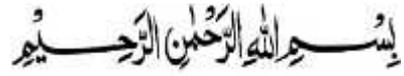
**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN PEMODERASI SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PADA PEMERINTAHAN DESA
DI KABUPATEN ASAHAN**

**Windi Triana
NPM. 1820050033**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan pemoderasi sistem pengendalian intern pada pemerintahan desa di Kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif kuantitatif dengan mempergunakan pendekatan empiris untuk mengetahui data primer dilapangan dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Asahan. Sampel penelitian ini adalah 54 Desa dengan 108 responden. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini menggunakan metode *Structure Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan pemoderasi sistem pengendalian intern pada pemerintahan desa di Kabupaten Asahan, berdasarkan indikator adalah sebagai berikut : Pertama, penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang berarti dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi, maka kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa yang disajikan akan lebih baik. Kedua, sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi pengaruh antara penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak signifikan dalam mempengaruhi hubungan antara penerapan sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan, yang berarti sistem pengendalian intern tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk itu diharapkan kepada seluruh perangkat desa sebaiknya mendapatkan pelatihan khusus terutama mengenai penerapan sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) dan sebaiknya sistem pengendalian intern pada pemerintahan desa di Kabupaten Asahan harus diterapkan secara lebih baik lagi karena sistem pengendalian yang lebih baik akan meminimalkan kemungkinan kepala desa atau perangkat desa untuk berbuat yang tidak sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Kata Kunci : *Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kesejahteraan, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Pemoderasi Sistem Pengendalian Intern Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Asahan.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini, oleh sebab itu perbaikan – perbaikan diharapkan dapat dilakukan dalam penulisan tesis selanjutnya dan penulis menyadari tidak dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sendiri, banyak pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.

Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini dan secara khusus peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Jumari dan Ibu Gina (Ayah dan Ibu tercinta) yang selalu memberikan doa dan dukungan semangat penuh yang tidak tebalas kepada penulis
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP., Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum., Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd., Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si., Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA., Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, S.E, M.Si., Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen

Pembimbing I yang telah banyak membimbing sehingga tesis ini dapat diselesaikan

9. Ibu Dr. Prawidya Hariani, S.E., M.Si. pembimbing II yang telah banyak membimbing sehingga tesis ini dapat diselesaikan
10. Bapak dan Ibu Dosen seluruh Dosen Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
11. Staff Biro Akademik Program PascaSarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
12. Bapak M. Azmy Ismail, AP, M.Si Kepala Dinas PMD Kabupaten Asahan
13. Seluruh Staff dan Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Asahan
14. Para sahabat serta rekan-rekan Mahasiswa angkatan 2018 Prodi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
15. Syariffudin, S.E calon suami yang telah memberikan dukungan secara penuh dalam penyelesaian tesis ini

Akhir kata penulis mengucapkan semoga Allah menambahkan kenikmatan, kesejahteraan dan kedamaian dalam kehidupan ini dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi almamater dan bagi kita semua. Amin

Medan, Oktober 2019
Penulis,

Windi Triana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Tujuan	11
1.5 Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Uraian Teori	13
2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan	13
2.1.2 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	18
2.1.3 Sistem Pengendalian Intern	26
2.2 Penelitian Relevan	31
2.3 Kerangka Konseptual	36
2.4 Hipotesis	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Pendekatan Penelitian	41
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian	41
3.3 Populasi Dan Sampel	42
3.4 Defenisi Operasional Variabel	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Teknik Analisis Data	46
3.7 Pengujian Hipotesis	55
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	57
4.1 Hasil Penelitian	57
4.1.1 Deskripsi Data	57
4.1.1.1 Karakteristik Responden	58
4.1.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian	60
4.1.2 Uji Persyaratan Analisis	69
4.1.2.1 Analisis Model Struktural (Inner Model)	70
4.1.3 Pengujian Hipotesis	73
4.2 Pembahasan	75
4.2.1 Pengaruh PSIA terhadap KLK	75
4.2.2 Kemampuan SPI dalam memoderasi pengaruh PSIA terhadap KLK	77
BAB V Kesimpulan dan Saran	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.2 Rencana Waktu Penelitian.....	41
Tabel 3.3 Nama Desa yang menjadi Sampel	43
Tabel 3.4 Defenisi Operasional Variabel	44
Tabel 3.5 Bobot Skala <i>Likert</i>	45
Tabel 3.6 Hasil <i>Average Variance Extracted</i> (AVE).....	48
Tabel 3.7 Hasil <i>Outer Loading</i>	48
Tabel 3.8 Hasil <i>Cross Loading</i>	50
Tabel 3.9 Hasil Uji Reliabilitas	53
Tabel 4.10 Pengumpulan Data	57
Tabel 4.11 Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin	58
Tabel 4.12 Deskripsi Responden berdasarkan Usia.....	58
Tabel 4.13 Deskripsi Responden berdasarkan Masa Kerja.....	59
Tabel 4.14 Deskripsi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	60
Tabel 4.15 Penyajian Data Angket Variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X)	60
Tabel 4.16 Penyajian Data Angket Variabel Sistem Pengendalian Intern (Z).....	63
Tabel 4.17 Penyajian Data Angket Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)	66
Tabel 4.18 <i>R-square</i>	71
Tabel 4.19 <i>F-square</i>	72
Tabel 4.20 <i>Path Coefficient</i>	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	39
Gambar 3.2	Model Struktural PLS	46
Gambar 3.3	Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	53
Gambar 3.4	Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	55
Gambar 4.5	Grafik Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	62
Gambar 4.6	Grafik Sistem Pengendalian Intern	65
Gambar 4.7	Grafik Kualitas Laporan Keuangan	68
Gambar 4.8	Model Struktural PLS	70
Gambar 4.9	Output R-square	71
Gambar 4.10	Output F-square	72
Gambar 4.11	Output Path Coefficient	73

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II Kuesioner Penelitian
- Lampiran III Data Tabulasi Penelitian
- Lampiran IV Hasil Pengolahan Data menggunakan Smart PLS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem tata kelola yang tepat terhadap suatu lembaga disebut dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan sistem tata kelola yang baik, mengindikasikan kinerja baik dari sisi manajemen untuk dapat menghasilkan *output* yang sesuai dengan tujuan lembaga. Begitu juga pada sektor pemerintahan, setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk dapat memberikan informasi serta laporan pertanggung jawaban yang jelas dan transparan atas hasil kinerja yang dilakukan terhadap para *stakeholder* yaitu masyarakat. Berbagai Peraturan Pemerintah dibuat sebagai acuan dalam pengelolaannya laporan keuangannya.

Peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan bahwa asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat harus dijadikan sebagai acuan, sehingga keuangan daerah dapat dikelola dengan tertib, ekonomis dan efisien, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektif dan transparan (Pradono dan Basukianto, 2015).

Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk, (Eko S., 2014). Terbentuknya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan tonggak baru bagi sistem otonomi desa, sebuah negara dengan sistem pembangunan *bottom-up* atau bisa disebut juga membangun negara mulai dari daerah pesisir. UU ini desa diberi otorisasi yang luas dalam mengelola tata pemerintah sendiri serta termasuk dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu,

pemerintah desa diberi keleluasaan untuk mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. Undang-Undang desa memberikan kedudukan kepada desa untuk lebih diakui Ismadani (2015) dan memberikan payung hukum terhadap eksistensi desa Risadi, A. A. (2015). Desa akan menjadi subyek percontohan pemerintahan Hoesada, J. (2014).

Desa sebagai level pemerintahan terendah yang memiliki hak untuk mengatur daerah pemerintahannya sendiri tanpa meninggalkan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Desa memiliki batas-batas wilayah yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Risadi, A. A., 2015).

Desa perlu diberikan perhatian yang sangat serius untuk menjalankan otonomi daerah karena desa memiliki posisi yang sangat strategis (Widjaja, HAW., 2005). Prinsip "*money should follow function*" atau setiap penyerahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada penyerahan anggaran pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah dibidang keuangan, (Bahl, Roy W., 1999). Hal ini juga berlaku untuk pengelolaan keuangan dana desa. APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) mengatur pengelolaan keuangan dana desa menjadi kewenangan desa. Pengelolaan keuangan dana desa menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa.

Desa sebagai suatu bagian dari lembaga pemerintahan, tidak luput dari tuntutan transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan keuangannya (Septiawan, 2018). Sudah banyak peraturan pemerintah dibuat sebagai pengaturan tentang desa.

Sonny Harry B Harmadi selaku Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat, Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, meluncurkan Interkoneksi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) serta Sistem Koordinasi Pembangunan Desa (Siskorbangdes). Interkoneksi OMSPAN dengan Siskeudes ditujukan untuk penyederhanaan pelaporan keuangan desa. Hal tersebut sesuai arahan Presiden Jokowi dan Menko PMK Puan Maharani agar laporan pengelolaan keuangan desa disederhanakan. Dengan adanya interkoneksi ini, diharapkan operator desa tidak lagi melakukan input data berulang ke setiap sistem. Siskorbangdes sebagai salah satu instrumen koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Undang-Undang desa dari sektor terkait.

Interkoneksi OMSPAN dengan Siskeudes didasari atas kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) secara umum dan dana desa secara khusus. Kewajiban tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Akan tetapi, implementasi regulasi itu tidaklah mudah. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan minimnya waktu dalam melakukan penginputan data kegiatan serta realisasi keuangan menjadi kendala utama di dalam pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Siskorbangdes sebagai salah satu instrumen koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Undang-Undang Desa dari sektor terkait. Siskorbangdes digunakan untuk mendapatkan kebutuhan data dan informasi antar

kementerian agar nantinya rekomendasi kebijakan dan keputusan pembangunan desa yang diambil dapat lebih efektif.

Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Adiperdana mengatakan, Penerapan Siskeudes sampai dengan Desember 2018 sudah 93 % Desa atau pada 95 % Kabupaten/Kota yang mendapatkan Dana Desa. Hal ini berarti masih ada kepala desa yang belum tahu soal pengelolaan administrasi keuangan dana desa. Penerimaan dana oleh pemerintah desa tentunya akan berdampak pada tuntutan tanggungjawab pengelolaan tersebut dari pengelola. Pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Desa serta Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, laporan hasil pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap masyarakat. Pengungkapan laporan keuangan Desa digunakan masyarakat untuk memberikan penilaian atas hasil kinerja aparatur desa serta sebagai media dalam menunjukkan transparansi dan akuntabilitas segala informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Desa memiliki beberapa sumber pendapatan terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014). Sumber penerimaan desa yang sangat banyak harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif dan

bebas dari penyalahgunaan (Azhar, A., 2015). Beberapa pihak yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran desa adalah kepala desa dan perangkatnya, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Perencanaan Masyarakat Desa) dan perwakilan kelompok masyarakat desa lainnya. Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Kepala desa dan perangkat desa berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan APBDes (Gayatri & Latrini, 2018).

Laporan keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi yang merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik yang merupakan pertanggungjawaban kepala desa (Tanjung, A. H., 2000). Laporan realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari, laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi APBDes yang harus disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang harus dilaporkan bulan Januari pada tahun berikutnya.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas menurut SAP No. 24 Tahun 2005; IPSAS Tahun 2010; dan PP No. 71 Tahun 2010 adalah suatu laporan keuangan yang memenuhi empat karakteristik yaitu **pertama**, relevan. Informasi yang relevan terdapat karakteristik: memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki nilai prediktif (*predictive value*), tepat waktu dan lengkap; **kedua** andal, laporan keuangan bebas dari salah pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Karakteristiknya adalah penyajian yang jujur, dapat

diverifikasi (*verifiability*), dan *netrality*; **ketiga**, dapat dibandingkan. Laporan keuangan akan berkualitas jika informasi dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya; **keempat**, dapat dipahami. Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan pemahaman bagi para pengguna laporan keuangan.

Pemerintah pusat melalui BPKP memberikan aplikasi pengelolaan keuangan desa berupa sistem keuangan desa (Siskeudes) untuk membantu dan memudahkan para perangkat desa dalam membuat pelaporan dan pertanggung jawaban laporan keuangan desa secara cepat dan efisien sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Rahmawati & Fajar, 2017). Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Rusmayanti (2014) bahwa sistem pengelolaan keuangan desa akan menjadikan pemerintah desa menjadi lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan desa serta pendokumentasian akan menjadi lebih mudah karena jumlah berkas yang efisien serta manfaat data yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengimplementasian berbagai regulasi dibidang pengelolaan keuangan desa, sistem informasi pengelolaan keuangan desa sebagai alat terpadu yang dijadikan alat bantu pemerintah desa.

Menurut Sari (2018) menyatakan bahwa laporan keuangan yang belum memenuhi syarat karena penerapan sistem informasi akuntansi yang belum berhasil disebabkan oleh kualitas layanan yang disediakan oleh sistem tidak optimal, sistem informasi keuangan daerah (SIKD) di Kabupaten dan Kota masih belum memberikan kepuasan kepada pengguna, dapat diandalkan atau belum terintegrasi secara memadai.

Dalam rangka membangun penerapan sistem informasi akuntansi yang berkualitas maka diperlukan sistem pengendalian intern. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Azhar Susanto (2013) bahwa pengendalian diperlukan di dalam sistem agar sistem dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian Azhar Susanto (2013) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern akan sangat efektif bila pengendalian tersebut menyatu dengan infrastruktur dan merupakan bagian penting bagi organisasi. Sejalan dengan penelitian Wahyuni et all (2019) menyatakan bahwa dengan sistem pengendalian internal yang baik, akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Demi mendorong peningkatan kualitas dan inisiatif, menghindari biaya yang tidak seharusnya dan menghasilkan respon yang cepat terhadap perubahan keadaan dibutuhkan pengendalian intern yang menyatu dalam infrastruktur.

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa oleh pemerintah pada setiap desa yang ada di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Asahan khususnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Asahan adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Asahan merupakan Kabupaten Pertama di Indonesia yang membentuk lembaga pengawas pelayanan umum bernama Ombudsman Daerah Asahan, melalui SK Bupati Asahan Nomor: 419-Huk/Tahun 2004, tertanggal 20 Oktober 2004. Kabupaten Asahan terdiri dari 25 Kecamatan dan 177 Desa. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pada salah satu Desa di Kabupaten Asahan terdapat penarikan dana dari Rekening Kas Desa (RKD) belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp71.809.045,00. Hasil

pemeriksaan juga menunjukkan terdapat perbedaan antara SiLPA ADD 2017 ada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Anggaran Dana Desa (ADD) dan APBDesa tahun 2018. Pada LRA ADD disajikan sebesar Rp24.369.564,00, sedangkan pada APBDesa tahun 2018 disajikan sebesar Rp29.919.564,00. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan terhadap Laporan Realisasi Anggaran DD dan ADD.

Fakta dilapangan juga menunjukkan perlu waktu minimal 10 hari untuk melakukan input laporan sehingga mengakibatkan lambatnya penyaluran dana desa khususnya tahap II dan III. Pemicu utama keterlambatan karena desa harus membuat laporan realisasi penyerapan dan laporan capaian output Dana Desa tahun sebelumnya. Melalui interkoneksi OMSPAN dengan Siskeudes diharapkan menjadi solusi dalam penyederhanaan laporan keuangan dana desa dan APBDes serta memperlancar penyaluran dana desa.

Selanjutnya menurut Millichamp, et all (2008) bahwa jika tidak dilakukan pengendalian internal yang dibangun ke dalam sistem maka sebuah sistem akuntansi dan sistem pembukuan (*score keeping*) tidak akan berhasil. Hal tersebut sependapat dengan Ruth, W., et all (2003) bahwa tanpa pengendalian internal yang tepat maka akan mengakibatkan ketidakakuratan dan ketidakefisienan sistem informasi dalam mengembangkan suatu sistem informasi yang memerlukan pengendalian internal. Jika sistem pengendalian internal lemah, akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang ada tidak teliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan serta tidak dapat dipatuhinya kebijakan manajemen yang ditetapkan. Hal tersebut sependapat dengan O'Brien (2010) bahwa untuk membantu upaya pihak manajemen dalam melindungi aset-

asetnya dari kehilangan dan penggelapan serta memelihara keakurasian data-data keuangan perusahaan dengan membangun pengendalian intern dalam sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Kemudian Wilkinson, Joseph W. (1996) menyatakan bahwa jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta di bawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas.

Pelaksanaan sistem informasi keuangan desa terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan temuan BPKP yaitu

- (1) egosentrisme kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Kepala desa lebih banyak berperan dan terfokus dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan keuangan desa. Dalam mengaktualisasikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, kepala desa kurang mampu mengaktifkan kerja sama tim (*team building*);
- (2) ketidakpahaman regulasi dan kebijakan pengelolaan dana desa. Banyak pemerintah desa yang tidak paham tentang substansi dan aturan hukum dalam pengelolaan keuangan desa. Pemahaman pengelolaan keuangan desa terbatas hanya pada pengajuan pencairan dana desa, perumusan pengalokasian penggunaan dana desa, serta pelaporan administratif. Tidak memahami substansi dana desa sebagai media penguatan fungsi dan kinerja pemerintahan desa serta serangkaian program pemberdayaan masyarakat;
- (3) lemahnya pengawasan publik.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan

mengetahui pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi keuangan desa dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan dengan judul penelitian ini “penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan pemoderasi sistem pengendalian intern pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Asahan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan desa belum diterapkan secara optimal.
2. Perlu waktu minimal 10 hari untuk melakukan input laporan sehingga mengakibatkan lambatnya penyaluran dana desa khususnya tahap II dan III.
3. Minimnya sistem pengendalian intern yang dilakukan pemerintah desa.
4. Ketidapahaman regulasi dan kebijakan pengelolaan dana desa. Banyak pemerintah desa tidak paham tentang substansi dan aturan hukum dalam pengelolaan dana desa.
5. Egosentrisme kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Kepala desa lebih banyak berperan dan terfokus dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan keuangan desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Desa di Kabupaten Asahan?
2. Apakah sistem pengendalian intern mampu memoderasi penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Desa di Kabupaten Asahan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan Desa di Kabupaten Asahan.
2. Untuk menguji dan menganalisis kemampuan sistem pengendalian intern dalam memoderasi pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Asahan.

1.5 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

1. Bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Bagi akademisi akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi publik dan bahan referensi penelitian selanjutnya.

3. Bagi pemerintah daerah adalah untuk memberikan kontribusi untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam rangka mencapai tujuan instansi secara efektif, efisien, menyampaikan laporan keuangan secara berkualitas, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Desa (LKPD).

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang kuantifikasi dalam nilai moneter (Keiso dan Weyrandt, 2007).

Financial reporting is a structure that describes how the financial information provided and reported to achieve the goals of economic and social state (Kesuma, 2014). Pelaporan keuangan adalah struktur yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan diberikan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan negara ekonomi dan sosial.

Financial report is a structured report about the financial position and transactions carried out by a reporting entity (Nordiawan et al., 2009). Laporan keuangan adalah laporan terstruktur tentang posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor. Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi harus bermanfaat bagi para pengguna, dapat disebut juga dengan informasi harus mempunyai nilai.

Laporan keuangan pemerintah yang disusun harus mengikuti PSAP yang berlaku, kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan

merupakan suatu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan juga dasar untuk pengambilan keputusan bagi pihak eksternal sehingga laporan keuangan yang diaudit harus dilampiri dengan pengungkapan (Setyowati, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi, 2007).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka laporan keuangan adalah informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas yang tersaji secara terstruktur yang digunakan untuk pengambilan keputusan entitas. Laporan keuangan pokok berbasis kas menuju akrual harus disusun oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang meliputi antara lain :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi APB Desa

b. Catatan Atas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mensyaratkan kualitas laporan keuangan harus dipenuhi oleh setiap sektor pemerintahan untuk dapat memenuhi kebutuhan dari para pemakainya. Terdapat dua kriteria utama sesuai dengan peraturan pemerintah di atas yang dibutuhkan agar manajemen dapat memberikan bentuk pertanggungjawaban kegiatannya dengan laporan keuangan yang memberikan kepuasan bagi pengguna informasi. Pertama, Relevansi yaitu setiap informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan desa dalam hal ini harus memenuhi unsur memberikan manfaat umpan balik (*feed back*), memiliki manfaat prediktif berkaitan keputusan dan konsekuensi apa saja yang bisa terjadi pada entitas pemerintah serta tepat waktu. Kedua, berkaitan dengan keandalan, dimana informasi yang andal yaitu informasi yang dalam penyajiannya jujur, dapat diverifikasi dan netral atau tidak mementingkan kepentingan pihak tertentu dalam pemerintahan.

Laporan keuangan bebas dari salah pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Karakteristik yang dipenuhi adalah penyajian yang jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), dan netralitas, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan akan lebih berguna apabila informasi dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Begitu juga laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna (Gayatri, & Latrini, M. Y., 2018). Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi

keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan (Harahap, 2013).

Kualitas informasi yang penting ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai.

Kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat, sehingga kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah alat untuk memfasilitasi agar laporan keuangan semakin transparan dan akuntabel. Informasi keuangan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas dengan menerapkan SAP. SAP memiliki kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Kualitas laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan yang memiliki kriteria antara lain: kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern (Yuliani, 2010).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, kualitas laporan keuangan adalah suatu penyajian laporan keuangan dengan kriteria utama yaitu laporan keuangan yang disajikan harus relevan dan andal, sehingga mudah dipahami oleh para

pemakai laporan keuangan.

Tanjung (2013) menyatakan bahwa masing-masing entitas pelapor memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan yang sistematis dan terstruktur dalam periode pelaporan untuk kepentingan sebagai berikut :

- a. *Accountability*, bertanggungjawab atas manajemen sumber daya dan implementasi kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara berkala;
- b. *Management*, membantu pengguna untuk mengevaluasi implementasi entitas pelaporan dalam periode pelaporan untuk memfasilitasi perencanaan, manajemen, dan pengendalian semua aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat;
- c. *Transparency*, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan,
- d. *Intergeneration Balance*, membantu pengguna untuk menentukan kecukupan pendapatan pemerintah dalam periode pelaporan untuk menutup semua biaya yang dialokasikan dan apakah generasi masa depan akan dianggap menanggung beban pengeluaran ini,
- e. *Performance Evaluation*, mengevaluasi kinerja entitas pelapor, khususnya dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.1.2 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan satu sama lain yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi didalam mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi (Laudon, 2012).

Pemerintah Desa sebagai organisasi publik diperlukan dukungan dari sistem informasi akuntansi supaya dapat berjalan efektif, efisien, bersih, dan transparansi. Kualitas sistem informasi akuntansi adalah terintegrasi dan harmonisasi antara komponen-komponen sistem informasi akuntansi yang diantaranya hardware, software, brainware, prosedur, basis data, jaringan komputer dan komunikasi data (Azhar Susanto, 2008).

Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah membuat aplikasi sistem informasi akuntansi berbasis komputer yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang memadai dan dapat diandalkan untuk membantu mensukseskan implementasi dana desa. Melalui aplikasi ini, pemerintah desa diharapkan memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 mempertegas penggunaan Siskeudes kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk memahami Siskeudes dengan baik dan menggunakan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa.

Penggunaan teknologi informasi pada pemerintah desa akan membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Indikator utama suatu sistem informasi dikatakan efektif adalah dengan keamanan data. Data perlu mendapatkan keamanan dari bencana alam, tindakan yang disengaja ataupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi illegal access dan kerusakan sistem, kedua, kecepatan dan ketepatan

waktu.

Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah : suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Peran dan fungsi sistem informasi akuntansi adalah sebagai pendukung aktivitas sehari-hari, mendukung proses pengambilan keputusan, membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung-jawabnya kepada pihak eksternal (Azhar, 2013). Laporan keuangan adalah suatu informasi yang paling dibutuhkan oleh pihak eksternal berkaitan sistem informasi akuntansi. Laporan keuangan merupakan produk dari sistem informasi akuntansi (Albrecht, etc; 2008). Untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan diperlukan sistem informasi akuntansi yang efektif. Keefektifan sistem informasi akuntansi merupakan proses pengumpulan, penginputan, pemrosesan data, penyimpanan, manajemen, pengendalian dan laporan informasi akuntansi dalam organisasi yang dapat mencapai kualitas laporan keuangan.

Suatu sistem terdiri dari beberapa bagian yang terhubung untuk suatu tujuan tertentu. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat pengumpulan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi ini meliputi orang, prosedur dan intruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan.

Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi (Laudon, 2012).

Menurut Gelinas et al (2012) bahwa informasi akuntansi yang berkualitas adalah informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Pengguna memiliki kriteria khusus untuk kualitas informasi untuk menentukan kualitas keputusan dengan memberikan tambahan penekanan pada relevansi, ketepatan waktu, akurasi, dan kelengkapan. Hal tersebut sejalan dengan James A Hall (2007) yang menyatakan bahwa informasi yang berkualitas tinggi adalah informasi yang dapat membantu pengguna untuk melakukan tindakan yang di harapkan.

Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa (BPKP, 2016). Fitur-fitur yang disajikan dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dirangkai sederhana mungkin dan *user friendly* sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Pemrosesan penginputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, akan menghasilkan beberapa *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain: Dokumen Penatausahaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bukti Penerimaan, Surat Setoran Pajak (SSP), Buku Pajak, Laporan-laporan, Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana), Laporan Penatausahaan

Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pembantu, dan Register.

Sistem aplikasi Siskeudes memiliki kelebihan sebagai berikut, yaitu: sesuai peraturan, memudahkan tata kelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (*built-in internal control*), serta dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manualaplikasi.

Menurut Malahika, dkk. (2018), pengelolaan keuangan desa adalah suatu bentuk tahapan atau proses dalam mengelola keuangan desa yang terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa, antara lain :

- a. Perencanaan, merupakan tahap perumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. Pemerintah desa melakukan perencanaan dalam rangka pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangannya.
- b. Pelaksanaan, keuangan desa merupakan kegiatan dari proses perencanaan yang sudah ada dan kemudian pertahap-pertahap dilaksanakan dalam proses pembangunan desa. Untuk mencapai target pelaksanaan harus dilaksanakan dengan baik.
- c. Penatausahaan, keuangan desa merupakan suatu kegiatan pada tahap ini proses penatausahaan dalam proses pembangunan desa dan laporan harus di lakukan dengan baik. Dalam tahap ini seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan di kelompokkan dan disusun dengan baik untuk di laporkan.
- d. Pelaporan, keuangan desa yang dimaksud adalah tahap terakhir dari bentuk pengelolaan keuangan desa. Setelah semua proses telah selesai

akan disusun dalam bentuk laporan keuangan dan kemudian akan di laporkan kepada pihak yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa suatu bentuk tahap atau proses dalam mengelola keuangan desa terdiri dari 5 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa sebagai berikut:

- a. Perencanaan. Perencanaan merupakan tahap perumusan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- b. Pelaksanaan. Pelaksanaan keuangan desa merupakan kegiatan dari proses perencanaan yang sudah ada dan kemudian dilaksanakan secara bertahap dalam proses pembangunannya. Untuk mencapai target pelaksanaan harus dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.
- c. Penatausahaan. Penatausahaan dalam proses pembangunan desa dan laporan harus di lakukan dengan baik. Dalam tahap ini seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan di kelompokan dan disusun dengan baik untuk di laporkan. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam Buka Kas Umum (BKU) yang ditutup

setiap akhir bulan.

- d. Pelaporan. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- e. Pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Dalam proses pelaksanaannya, sebelum menginput data ke dalam aplikasi siskeudes, pemerintah desa harus menetapkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan sebelumnya dengan yang tertera dalam sistem. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang akan diinput tersebut merupakan rancangan yang akan digunakan untuk tahun berikutnya (Ayu et all., 2017).

Proses pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) harus disesuaikan terlebih dahulu dengan apa yang ada pada sistem. Sistem tidak dapat menginput data jika RAB tersebut tidak sesuai dengan yang terdapat dalam sistem. Hal tersebut juga dapat membantu para perangkat desa dalam bekerja,

dimana perangkat desa akan dituntut untuk bekerja dengan aturan yang telah ditentukan sehingga kinerja juga akan semakin baik.

Selain RAB terdapat beberapa dokumen yang diinput dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu dokumen penatausahaan, bukti penerimaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Setoran Pajak (SSP), laporan penganggaran (Perdes APBDesa, APBDesa per sumber dana), serta laporan penatausahaan (Buku kas umum, Buku bank, Buku pajak, Buku Pembantu, dan Register). Dokumen – dokumen yang akan diinput ke sistem, sebelumnya akan dibuat oleh perangkat desa yang bertugas yang telah dibagi ke bidang masing-masing. Setelah pegawai desa membuat rancangan laporan yang sesuai dan telah mendapat persetujuan selanjutnya akan diberikan kepada operator untuk diinput ke sistem. (Ayu, Sulina, Wahyuni, & Kurniawan, 2017).

Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Menurut Azhar Susanto (2008) menyatakan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi adalah terintegrasi dan harmonisasi antara komponen-komponen sistem informasi akuntansi yang diantaranya hardware, software, brainware, prosedur, basis data, jaringan komputer dan komunikasi data.

Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Alat untuk memfasilitasi agar laporan keuangan tersebut semakin transparan dan akuntabel yaitu dengan SAP. Dengan menerapkan SAP informasi keuangan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. SAP mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Laudon (2012) memberikan lima dimensi untuk mengukur keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi, dimensi-dimensi tersebut adalah:

- a. Tingkat penggunaan yang tinggi (*high level of system use*);
- b. Kepuasan pengguna terhadap sistem (*user satisfaction on system*);
- c. Sikap yang positif (*favorable attitude*) pengguna terhadap sistem tersebut;
- d. Tercapainya tujuan sistem informasi (*achieved objectives*); dan
- e. Imbal balik keuangan (*financial payoff*).

Selain itu, dimensi kualitas sistem informasi yang disampaikan oleh Livari (2005) adalah sebagai berikut:

- a. *Flexibility System Integration*
- b. *Response Time*
- c. *Recoverability*
- d. *Convenience*
- e. *Common Language*

Dimensi kesuksesan menurut DeLone dan McLean (2003), terdiri dari 6 (enam) variabel komponen keberhasilan sistem informasi, sebagai berikut:

- a. Dimensi kualitas sistem (*system quality*), yaitu mengukur kesuksesan sistem informasi secara teknis. Istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas sistem terdiri dari: *Ease-of- use, fucntionality, reliability, flexibility, integration, and importance*.
- b. Dimensi kualitas informasi (*Information quality*) yaitu mengukur kesuksesan informasi dalam menyampaikan makna yang dimaksud. Istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas informasi adalah: *accuracy, timelines, completeness, relevance, dan consistency*.
- c. Dimensi penggunaan sistem (*system use*) yaitu ukuran konsumsi output sistem yang diukur dengan istilah : *frequency of use, time of use, number of accesses, usage pattern, and dependency*.
- d. Dimensi Kepuasan pemakai (*User satisfaction*) menggambarkan respon pengguna terhadap sistem diukur dengan menggunakan istilah: *self-efficacy, repeat visit, personalization, perceived risk and enjoyment*.

2.1.3 Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, maka diperlukan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menghasilkan informasi keuangan yang kualitas. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP menyatakan bahwa, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai sehingga memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarnya,(I Gusti, 2008). Pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan system pengendalian intern merupakan fungsi dari unsur sistem pengendalian intern. Pengembangan unsur system pengendalian intern harus mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif (Herawati, 2014).

Pasal 15 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan pemeriksa BPK menyusun laporan hasil pemeriksaan LHP setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah mengandung sebuah opini. Opini merupakan pernyataan yang profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai kewajaran

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK wajib menguji dan menilai SPI Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, seperti yang diamanatkan dalam pasal 12 UU nomor 15 tahun 2004 yang menyatakan pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja.

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Sandanafu, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 bahwa unsur sistem pengendalian intern Pemerintah mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara, sama halnya seperti yang dinyatakan Indra (2011) yang meliputi :

- a. Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi atau lembaga yang mempengaruhi kesadaran dan tindakan personel dalam organisasi atau lembaga tentang pengendalian. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu lembaga adalah :
 - 1) Nilai integritas dan etika. Memelihara suasana etika organisasi dapat menjadi teladan untuk tindakan-tindakan yang benar. Menghilangkan godaan-godaan yang dapat melakukan tindakan yang tidak etis dan

menegakkan disiplin sebagaimana mestinya.

- 2) Komitmen terhadap kompetensi. menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah untuk mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan.
 - 3) Filosofi dan gaya operasi manajemen; Pimpinan instansi pemerintah harus memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam mengambil keputusan;
 - 4) Struktur organisasi merupakan kerangka kerja bagi manajemen dalam perencanaan, pengarahan, dan pengendalian organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi;
 - 5) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab. Tanggungjawab dan wewenang yang ada dibatasi oleh masing-masing satuan usaha.
 - 6) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM. Penetapan praktik-praktik yang layak dalam hal perolehan, orientasi, pelatihan, evaluasi, pembinaan, promosi, kompensasi dan tindakan disiplin bagi sumber daya manusia.
- b. Penilaian Risiko. Pelaporan keuangan bertujuan sebagai proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Diawali dengan penetapan visi dan misi instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Kemudian instansi Pemerintah mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut secara efisien dan efektif, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Penaksiran risiko mencakup:
- 1) Identifikasi Resiko, Mengidentifikasi yang dapat menghambat

pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi secara efisien dan efektif risiko.

- 2) Analisis Risiko. Menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi
- c. Kegiatan Pengendalian. Menurut Indra (2011) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen. kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif, yang mencakup :
- 1) Otorisasi yang memadai. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai
 - 2) Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai
 - 3) Pengecekan secara independen.
 - 4) Pemisahan fungsi yang memadai. Pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1(satu) orang
 - 5) Pengendalian fisik atas kekayaan pemda dan catatan. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengk
 - 6) Peninjauan atas kinerja. Memantau pencapaian kinerja instansi pemerintah tersebut dibandingkan dengan rencana sebagai tolak ukur kinerja.
- d. Informasi dan Komunikasi. Kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah transaksi dilaksanakan dengan mencegah terjadinya salah saji potensial terhadap pernyataan manajemen

dalam laporan keuangan. Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa - peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

- e. Pemantauan. Proses penilaian kualitas kinerja dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam melaksanakan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Rekomendasi hasil audit dan review harus segera ditindak lanjuti dengan cara diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

Tujuan pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* (2013) menyatakan bahwa : *An internal control is a process, affected by an*

entity's board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in (1) effectiveness and efficiency of operations (2) Reliability of financial reporting and (3) compliance with applicable laws and regulations, yang menjelaskan ada tiga fungsi dari sistem pengendalian intern, yaitu: (a). efisiensi dan efektivitas operasi, (b). keterandalan pelaporan keuangan, dan (c). kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

2.2 Penelitian Relevan

Data hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini disebut penelitian relevan atau penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menjadi dasar bagi penelitian-penelitian yang akan datang. Penelitian tentang efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan pemoderasi sistem pengendalian intern pada pemerintahan desa di Kabupaten Asahan ini belum pernah dilakukan sebelumnya, penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Desa yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan, yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Setyowati, Lilis Isthika, Wikan tiwi, Ririh Dian. (2016)	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) variabel peran teknologi informasi (TI) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, (2) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, (3) peran internal audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kata
Sang Ayu Nyoman Trisna Dewi & AANB Dwirandra (2013)	Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Pengguna Aktual Dan Kepuasan Pengguna Terhadap Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Di Kota Denpasar	Variabel Independen : Dukungan Manajemen Puncak, Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Pengguna Aktual Dan Kepuasan Pengguna Variabel Dependen : Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dukungan manajemen puncak, kualitas informasi dan kepuasan pengguna berpengaruh pada implementasi sistem informasi keuangan daerah. Kualitas sistem dan pengguna aktual secara signifikan tidak berpengaruh pada implementasi sistem informasi keuangan daerah.

Atik Rusmayanti, (2013)	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pada Desa Ngadirejan	Sistem Informasi Keuangan Desa	Hasil dari penelitian ini adalah mempermudah pihak kantor desa Pringkuku dalam proses pengelolaan keuangan, membantu dalam proses penginputan data, pencarian data, dan laporan data uang, dapat meminimalisasi adanya kesalahan dan mengoptimalkan keamanan data.
I Gusti Ayu Trisha Sulina, Made Arie Wahyuni, Putu Sukma Kurniawan, (2017)	Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)	Variabel Independen : Sistem Keuangan Desa Variabel Dependen : Kinerja Pemerintah Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penginputan data pada sistem keuangan desa (Siskeudes) harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem; (2) Cara untuk mengintegrasikan sumber daya manusia (SDM) yang rendah yaitu melalui pendampingan dan pelatihan; (3) Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai. Dari hal tersebut maka penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) memiliki peran yang penting terhadap kinerja pemerintah desa yang dirasakan langsung oleh para pegawai desa di Desa Kaba-kaba. Hal ini sesuai dengan tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu untuk membantu kerja pegawai desa.

Oktaviani Rita Puspasari, Dendi Purnama (2018)	Implementasi Sistem Keuangan Desa Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kuningan	Implementasi Sistem Keuangan Desa Dan Kualitas Laporan Keuangan	Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel kualitas data, dukungan manajemen puncak dan kualitas sistem tidak memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
Nadia Azizah Prabowo (2019)	Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Skpd Kabupaten Klaten)	Variabel Independen : Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa SIPKD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sally Paulina Sandanafu (2016)	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Study Empiris Pada Pemerintah Provinsi Maluku)	<p>Variabel Independen : Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa, standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
Tuti Herawati (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)	<p>Variabel Independen : Sistem Pengendalian Intern</p> <p>Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>Pengaruh sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 83%. Secara parsial, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi, hanya lingkungan pengendalian, penilaian resiko, dan informasi dan komunikasi yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p>

Nunung Sri Wahyuni (2019)	The Influence Of The Government's Internal Control System And The Availability Of Budgets On The Quality Of Financial Statement (Case Study in local governments in North Sumatra)	Variabel Independen : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Ketersediaan Anggaran Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, (2) ketersediaan anggaran tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, (3) Secara simultan sistem pengendalian internal pemerintah dan ketersediaan anggaran berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.
---------------------------	--	--	--

Sumber : Data diolah oleh penulis

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir teoritis DeLone dan McLean (1992) dikenal dengan DeLone and McLean Model of Information System Success (D&M IS Success), D&M IS Success Model mempunyai enam dimensi antara lain kualitas sistem, kualitas informasi, kepuasan pemakai, intensitas penggunaan, dampak individu, dan dampak organisasi. Kualitas sistem menunjukkan kualitas produk dari sistem informasi dan kualitas informasi menunjukkan kualitas produk yang dihasilkan oleh sistem informasi. Sikap pemakai sistem informasi sebagai penerima informasi ditentukan oleh kedua kualitas tersebut. Pengaruh terhadap pemakai sistem informasi akan menentukan kepuasan dari pemakainya dan dampak pada individualnya serta pengaruh dari sistem sistem informasi akan mempengaruhi dampak organisasinya.

Kemudian kerangka teoritis tersebut menunjukkan kualitas sistem (*system quality*) dan kualitas informasi (*information quality*) yang baik, yang direpresentasikan oleh pengguna sistem informasi yang dapat berpengaruh

terhadap tingkat penggunaan sistem yang bersangkutan (*intended to use*) dan kepuasan pengguna (*user satisfaction*). Kualitas sistem merupakan kualitas dari kombinasi *hardware* dan *software* dalam sistem informasi (DeLone dan McLean, 1992), kemudian disimpulkan bahwa semakin baik kualitas sistem dan kualitas output sistem yang diberikan maka pengguna tidak merasa enggan untuk melakukan pemakaian kembali (*reuse*); yang akan berdampak pada intensitas pemakaian sistem yang meningkat. Pemakaian yang berulang-ulang berarti bahwa pemakaian yang dilakukan bermanfaat bagi para pemakainya.

Besarnya manfaat yang diperoleh mengakibatkan pemakai sistem informasi akan lebih puas. Seberapa sering pengguna memakai sistem informasi menjadi acuan pengembangan sistem informasi. Semakin sering pengguna tersebut memakai sistem informasi, akan semakin banyak tingkat pembelajaran (*degree of learning*) yang didapat oleh pengguna mengenai sistem informasi McGill et al. (2003). Terdapat pengaruh keberadaan sistem terhadap kualitas pengguna (*individual impact*) menyebabkan peningkatan pembelajaran menjadi salah satu indikatornya. Berbeda dengan Livari (2005) yang memberikan bukti empiris bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap intensitas penggunaannya, dan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan penggunanya. Hal ini, dikarenakan obyek penelitian tersebut menggunakan obyek penggunaan sistem mandatory.

Penerapan sistem informasi akuntansi dapat berjalan dengan sukses apabila di dalam sistem tersebut juga dibangun sistem pengendalian internal. Sesuai dengan pendapat Millichamp, et all (2008) bahwa pengendalian diperlukan di dalam sistem agar sistem dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan

dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian Ruth, W. (2003) menyatakan bahwa jika tidak dilakukan pengendalian, yang dikenal sebagai pengendalian internal, yang dibangun ke dalam sistem, sebuah sistem akuntansi dan sistem pembukuan (*score keeping*) tidak akan berhasil melaksanakan pengolahan secara lengkap dan akurat dari semua transaksi akuntansi. Menurut Arens, et all (2014) menyatakan bahwa perusahaan diharuskan untuk mengembangkan pengendalian internal dengan tujuan untuk memberikan kepastian yang layak bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar.

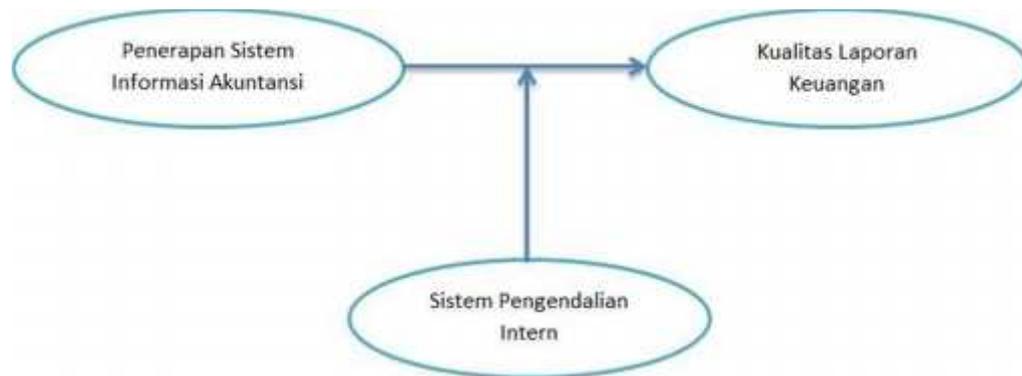
Secara umum sistem pengendalian intern memiliki lima komponen yaitu:

1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) aktivitas pengendalian, 4) Informasi dan komunikasi, dan 5) pemantauan, COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) (2013). Tujuan sistem informasi akuntansi dapat tercapai dengan membangun kelima komponen sistem pengendalian intern tersebut dalam infrastruktur sistem informasi akuntansi. Hal tersebut sejalan dengan Millichamp, et all (2008) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern akan sangat efektif apabila pengendalian tersebut menyatu dengan infastruktur dan merupakan bagian penting bagi organisasi. Peningkatan kualitas dan inisiatif, serta menghindari biaya yang tidak seharusnya dan menghasilkan respon yang cepat terhadap perubahan keadaan didorong oleh pengendalian intern yang menyatu dalam infrastruktur. Kemudian Jones, et all (2003) menyatakan bahwa untuk mengembangkan suatu sistem informasi diperlukan pengendalian internal, tanpa pengendalian internal yang tepat, dapat mengakibatkan ketidakakuratan dan ketidakefisienan sistem informasi.

Penelitian Guan (2010) menyakan bahwa untuk melindungi secara utuh

atau memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan yang berasal dari sistem informasi akuntansi ditawarkan suatu konsep tentang penerapan pengendalian intern dalam sistem informasi akuntansi. Kemudian penelitian Doyle, et all (2007) menyakatakan bukti bahwa pada umumnya kesalahan akuntansi dalam sistem pengendalian intern yang lemah lebih banyak terjadi dibandingkan dengan pada umumnya kesalahan akuntansi dalam sistem pengendalian intern yang kuat. Pendapat lainnya oleh Icceman and Hilton, (1990) mengemukakan bahwa lemahnya kualitas informasi akuntansi disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian intern perusahaan atas laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2016), Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Hipotesis pada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang dikatakan jawaban sementara, sedangkan kebenaran dari hipotesis perlu diuji terlebih dahulu melalui analisis data. Hipotesis dalam penelitian ini menjelaskan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dan variabel moderasi. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Asahan.
2. Sistem pengendalian intern mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Asahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian assosiatif kuantitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih (Sugiono, 2016). Metode penelitian kuantitatif dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau dengan pengujian statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2016).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Desa yang berada di wilayah Kabupaten Asahan Povinsi Sumatera Utara.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Rencana Waktu Penelitian

No.	Tahapan Penelitian	Des-2019				Jan-20				Feb-20				Mar-20				Apr-20				Mei-2020				Jun-20				Jul-20				Agus-20			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	■																																			
2	Penyusunan Proposal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
3	Seminar Proposal																																				
4	Pengumpulan Data																																				
5	Pengolahan Data																																				
6	Penulisan Laporan																																				
7	Seminar Hasil																																				
8	Penyelesaian Laporan																																				
9	Sidang Meja Hijau																																				

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah desa yang berada di wilayah Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Asahan terdiri dari 25 Kecamatan, namun hanya 23 Kecamatan yang wilayahnya berupa desa. Pemerintahan desa di Kabupaten Asahan terdiri dari 177 desa yang tersebar di 23 Kecamatan.

3.3.1 Sampel

Menurut Sugiyono (2016) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dilakukan jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Simple Random Sampling*. Jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Umar, 2008),

yaitu sebagai berikut :
$$n = \frac{N}{1 + Nd}$$

Dimana, N : Populasi (177 Desa)

d : Tingkat kesalahan 0.1 (10 %)

$$n = \frac{177}{1 + 177 \times 0.1^2}$$

$$n = 53,89$$

Dengan rumus tersebut, maka sampel dibulatkan menjadi 54 desa dengan jumlah responden sebanyak (54*2) 108 responden. Dimana yang menjadi responden adalah kepala desa atau sekretaris desa dan bendahara desa atau operator

siskeudes. Berikut ini adalah nama-nama desa yang menjadi sampel pada penelitian ini.

Tabel 3.3 Nama Desa yang menjadi Sampel

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN
1	Aek Loba	Aek Kuasan
2	Sengon Sari	
3	Aek Ledong	Aek Ledong
4	Ledong Barat	
5	Aek Songsongan	Aek Songsongan
6	Marjanji Aceh	
7	Aek Bamban	
8	Air Genting	Air Batu
9	Hessa Air Genting	
10	Hessa Perlompongan	
11	Pulau Pule	
12	Air Joman	Air Joman
13	Punggulan	
14	Subur	
15	Bandar Pasir Mandoge	Bandar Pasir Mandoge
16	Suka Makmur	
17	Silau Jawa	
18	Aek Nagali	Bandar Pulau
19	Gonting Malaha	
20	Bandar Pulau Pekan	
21	Ambalutu	Buntu Pane
22	Buntu Pane	
23	Prapat Janji	
24	Meranti	Meranti
25	Gajah	
26	Sei Piring	Pulau Rakyat
27	Padang Mahondang	
28	Mekar Sari	
29	Pulau Rakyat Pekan	
30	Bunut Seberang	Pulo Bandring
31	Gedangan	
32	Tanah Rakyat	
33	Gunung Melayu	Rahuning
34	Batu Anam	
35	Pondok Bungur	Rawang Panca Arga
36	Panca Arga	
37	Sei Alim Hasak	

38	Sei Kamah Baru	Sei Dadap
39	Pasiran	
40	Sei Kepayang Tengah	Sei Kepayang
41	Sei Kepayang Kanan	
42	Sei Nangka	Sei Kepayang Barat
43	Sei Tualang Pandau	
44	Sei Sembilang	Sei Kepayang Timur
45	Sei Silau Barat	Setia Janji
46	Lubuk Palas	Silau Laut
47	Simpang Empat	Simpang Empat
48	Sipaku Area	
49	Bagan Asahan Pekan	Tanjung Balai
50	Kapias Batu VIII	
51	Teluk Dalam	Teluk Dalam
52	Air Teluk Kiri	
53	Tinggi Raja	Tinggi Raja
54	Sidomulyo	

Sumber : Data diolah oleh penulis

Sampel pada penelitian ini berjumlah 54 desa, masing-masing ada 2 responden yang mewakili desanya. 54 desa tersebut mewakili 23 kecamatan yang berada di Kabupaten Asahan.

3.4 Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel atau konstruk tersebut (Sugiyono, 2016).

Tabel 3.4. Defenisi Operasional Variabel

No.	Nama Variabel	Defenisi Variabel	Indikator	Skala
1.	Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	Aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa (BPKP, 2016)	Kualitas System Kualitas Informasi Penggunaan Sistem Kepuasan Pemakai	Interval
2.	Sistem Pengendalian Intern	Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarnya (I Gusti, 2008).	1) lingkungan pengendalian 2) penilaian risiko 3) aktivitas pengendalian 4) Informasi dan komunikasi pemantauan	Interval
3.	Kualitas Laporan Keuangan	Kualitas laporan keuangan yang baik memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat (Yuliani, 2010)	Relevan Handal Tepat Waktu	Interval

Sumber : Data diolah oleh penulis

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden melalui kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016). Penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert, yang mana nilai jawaban dari responden masing-masing tersebut memiliki skor yang dapat dihitung. Dalam pengukurannya, setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu pertanyaan dengan skala penilaian sebagai berikut:

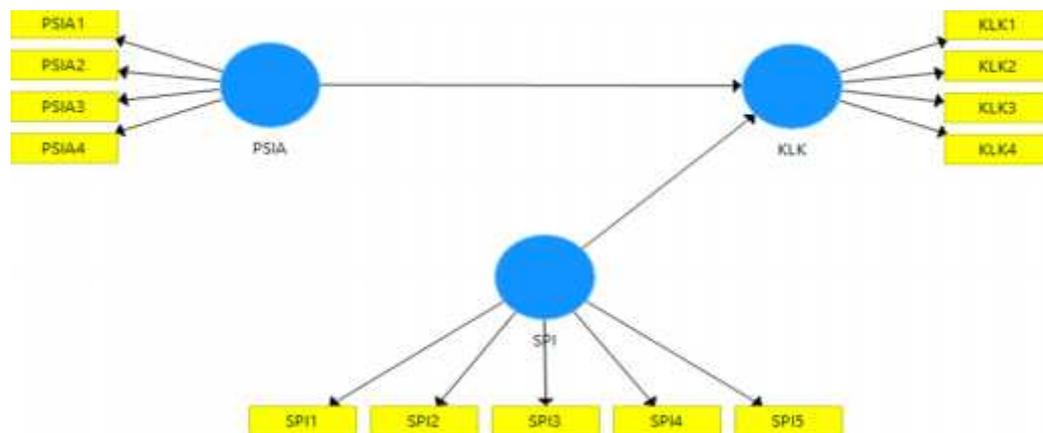
Tabel 3.5. Bobot Skala Likert

Kategori Pertanyaan/Pernyataan	Skala Likert
Sangat Memadai	5
Memadai	4
Kurang Memadai	3
Tidak Memadai	2
Sangat Tidak Memadai	1

Sumber : Sugiyono 2016

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *Structure Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (*path*) dengan variabel laten. Alat bantu yang digunakan adalah *software SmartPls ver. 3 for windows*. Berikut ini adalah model struktural dari perumusan masalah tersebut :



Gambar 3.2 Model Struktural PLS

3.6.1 Evaluasi Model

Menurut (Widarjono, 2015) analisis jalur di dalam PLS SEM menjelaskan hubungan antara variabel laten dan indikator didalam *outer* model. PLS SEM bertujuan untuk meminimalkan perbedaan antara nilai prediktif dan aktual dari variabel dependen. Estimasi parameter yang didapat dengan *Partial Least Square* (PLS) dapat dikategorikan sebagai berikut: kategori pertama, adalah *weight*

estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kategori kedua, mencerminkan estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (*loading*). Kategori ketiga adalah berkaitan dengan *means* dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi tersebut, *Partial Least Square* (PLS) menggunakan proses literasi tiga tahap dan dalam setiap tahapnya menghasilkan estimasi yaitu sebagai berikut:

1. Menghasilkan *weight estimate*.
2. Menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*.
3. Menghasilkan estimasi *means* dan lokasi (konstanta).

Ada dua evaluasi model PLS SEM yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*).

1. Evaluasi *Outer Model* atau *Measurement Model*

Analisis data dan uji hipotesis memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengumpulan data, salah satunya dengan melakukan uji instrumen penelitian. Pengujian instrumen dalam penelitian ini dilakukan di 4 desa yang berada di Kecamatan Air Batu. Keempat desa tersebut adalah Desa Air Genting, Desa Hessa Air Genting, Desa Hessa Perlompongan dan Desa Danau Sijabut. Pengujian instrumen ini menggunakan evaluasi *outer model*, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis *outer model* ini dilakukan dilakukan untuk memastikan bahwa *measurement* yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel).

a. Uji Validitas

Uji Validitas sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan tingkat ketepatan dari suatu instrumen. Instrumen yang valid yaitu ketika alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data juga valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur sehingga validitas lebih terfokus pada alat ukur pengamatan. Kegunaan validitas yaitu untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya (Sugiyono, 2016). Pengujian validitas instrumen penelitian ini menggunakan uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan.

1) Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (*manifest variable*) dari suatu konstruk harus berkorelasi tinggi, validitas konvergen dinilai berdasarkan *loading factor* serta nilai *Average Variance Extracted* (AVE). *Rule of thumb* yang digunakan dalam uji validitas konvergen adalah nilai *loading factor* > 0,5 serta nilai AVE > 0,5.

Tabel 3.6 Hasil *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel / Konstruk	AVE	Hasil Uji
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X)	0,799	Valid
Sistem Pengendalian Intern (Z)	0,684	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,665	Valid

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa nilai AVE untuk setiap variabel tersebut lebih dari 0,5 , maka dapat disimpulkan bahwa variabel atau konstruk yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

Tabel 3.7 Hasil Outer Loading

No.	Butir Pertanyaan	X	Z	Y	Hasil Uji
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X)					
1.	KS1	0,871			Valid
2.	KS2	0,779			Valid
3.	KS3	0,965			Valid
4.	KS4	0,687			Valid
5.	KI1	0,880			Valid
6.	KI2	0,855			Valid
7.	KI3	0,831			Valid
8.	KI4	0,994			Valid
9.	PS1	0,939			Valid
10.	PS2	0,959			Valid
11.	PS3	0,950			Valid
12.	PS4	0,894			Valid
13.	KP1	0,877			Valid
14.	KP2	0,963			Valid
15.	KP3	0,939			Valid
16.	KP4	0,869			Valid
Sistem Pengendalian Intern (Z)					
1.	LP1		0,928		Valid
2.	LP2		0,953		Valid
3.	LP3		0,945		Valid
4.	LP4		0,729		Valid
5.	LP5		0,875		Valid
6.	PR1		0,963		Valid
7.	PR2		0,710		Valid
8.	PR3		0,761		Valid
9.	PR4		0,880		Valid
10.	PR5		0,941		Valid
11.	KP1		0,533		Valid

12.	KP2		0,766		Valid
13.	KP3		0,994		Valid
14.	KP4		0,513		Valid
15.	IK1		0,961		Valid
16.	IK2		0,944		Valid
17.	IK3		0,553		Valid
18.	IK4		0,523		Valid
19.	P1		0,786		Valid
20.	P2		0,855		Valid
21.	P3		0,933		Valid
Kualitas Laporan Keuangan (Y)					
1.	R1			0,814	Valid
2.	R2			0,911	Valid
3.	RA1			0,889	Valid
4.	RA2			0,519	Valid
5.	RA3			0,967	Valid
6.	TL1			0,589	Valid
7.	TL2			0,906	Valid

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa nilai *outer loading* untuk setiap butir pertanyaan pada tabel tersebut lebih dari 0,5 , maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan pada variabel atau konstruk yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

2) Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Validitas diskriminan dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan variabel atau konstruk. *Rule of thumb* yang digunakan dalam uji validitas diskriminan adalah nilai *cross loading* lebih besar dari 0,7. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar dari ukuran konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan konstruk

laten memprediksi ukuran blok daripada ukuran blok lainnya.

Tabel 3.8 Hasil Cross Loading

No.	Butir Pertanyaan	X	Z	Y	Hasil Uji
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X)					
1.	KS1	0,871	0,798	0,793	Valid
2.	KS2	0,779	0,724	0,704	Valid
3.	KS3	0,965	0,913	0,927	Valid
4.	KS4	0,687	0,667	0,761	Valid
5.	KI1	0,880	0,806	0,812	Valid
6.	KI2	0,855	0,798	0,858	Valid
7.	KI3	0,831	0,779	0,811	Valid
8.	KI4	0,994	0,933	0,946	Valid
9.	PS1	0,939	0,874	0,884	Valid
10.	PS2	0,959	0,919	0,958	Valid
11.	PS3	0,950	0,917	0,922	Valid
12.	PS4	0,894	0,830	0,824	Valid
13.	KP1	0,877	0,877	0,825	Valid
14.	KP2	0,963	0,894	0,898	Valid
15.	KP3	0,939	0,885	0,899	Valid
16.	KP4	0,869	0,801	0,704	Valid
Sistem Pengendalian Intern (Z)					
1.	LP1	0,876	0,928	0,850	Valid
2.	LP2	0,906	0,953	0,905	Valid
3.	LP3	0,821	0,945	0,802	Valid
4.	LP4	0,726	0,729	0,781	Valid
5.	LP5	0,814	0,875	0,798	Valid
6.	PR1	0,906	0,963	0,889	Valid
7.	PR2	0,681	0,710	0,618	Valid
8.	PR3	0,669	0,761	0,665	Valid
9.	PR4	0,832	0,880	0,798	Valid
10.	PR5	0,871	0,941	0,878	Valid

11.	KP1	0,481	0,533	0,468	Valid
12.	KP2	0,687	0,766	0,665	Valid
13.	KP3	0,945	0,994	0,923	Valid
14.	KP4	0,372	0,513	0,401	Valid
15.	IK1	0,906	0,961	0,908	Valid
16.	IK2	0,880	0,944	0,863	Valid
17.	IK3	0,520	0,553	0,465	Valid
18.	IK4	0,516	0,523	0,481	Valid
19.	P1	0,829	0,786	0,774	Valid
20.	P2	0,817	0,855	0,785	Valid
21.	P3	0,879	0,933	0,906	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (Y)					
1.	R1	0,737	0,704	0,814	Valid
2.	R2	0,853	0,821	0,911	Valid
3.	RA1	0,881	0,826	0,889	Valid
4.	RA2	0,437	0,411	0,519	Valid
5.	RA3	0,978	0,955	0,967	Valid
6.	TL1	0,562	0,583	0,589	Valid
7.	TL2	0,857	0,828	0,906	Valid

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil uji *outer loading* tersebut, dapat dilihat bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian ini memiliki nilai *cross loading* yang lebih tinggi pada variabel yang dibentuknya daripada nilai *cross loading* pada variabel lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa butir pertanyaan pada variabel atau konstruk yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliabel, tetapi

pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan. Untuk menghasilkan data yang sama, uji reliabilitas terdapat persamaan dalam data dalam waktu yang berbeda, atau digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama (Sugyono, 2016). Suatu instrumen dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach's alpha* $> 0,70$.

Tabel 3.9 Hasil Uji Reliabilitas

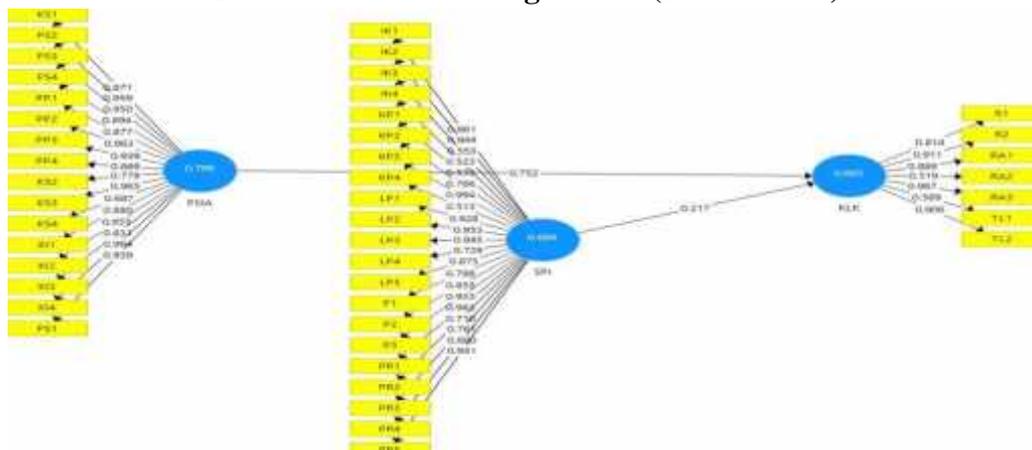
Variabel / Konstruk	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Hasil Uji
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X)	0,983	0,984	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern (Z)	0,974	0,978	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,908	0,930	Reliabel

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil uji reliabilitas tersebut, dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* dan nilai *composite reliability* masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah lebih dari 0,7 . Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator pada variabel penelitian ini adalah reliabel.

Pengujian *outer model* dengan *Partial Least Square* (PLS) pada penelitian ini menggunakan alat bantu *software Smart PLS ver. 3 for Windows*. Gambar model pengukuran (*outer model*) yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 3.3 Model Pengukuran (Outer Model)



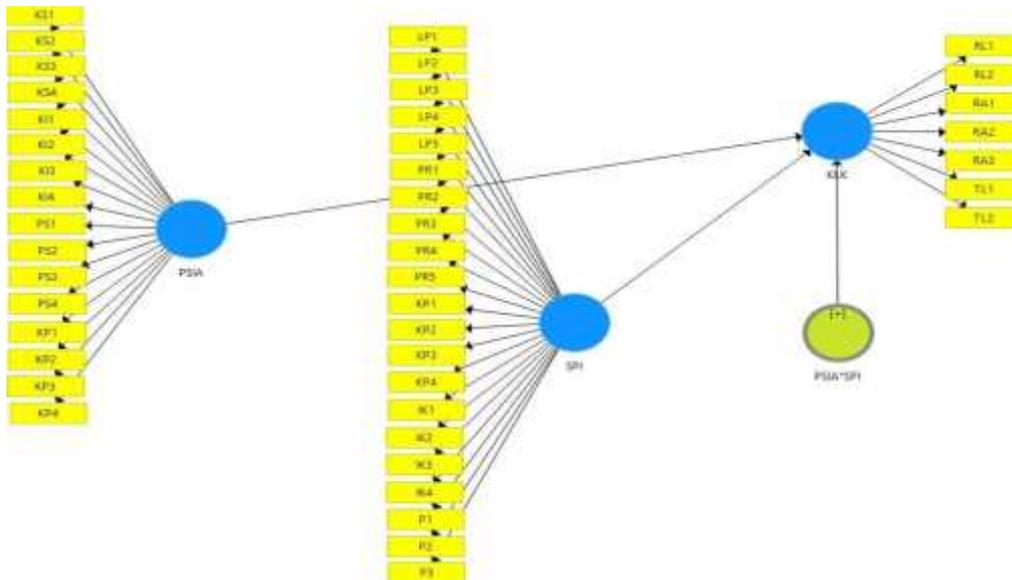
2. Evaluasi *Inner Model* (Evaluasi Model Struktural)

Setelah dilakukan evaluasi *outer model*, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi *inner model* atau model persamaan struktural yang menjelaskan pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen. Analisis *Inner Model* biasanya juga disebut dengan *inner relation*, *structural model* dan *substantive theory* yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada *substantive theory*. Analisa *inner model* dapat dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, *Stone-Geisser Q-square test* untuk *predictive* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam pengevaluasi *inner model* dengan *Partial Least Square* (PLS) dimulai dengan cara melihat *R-square* pada setiap variabel laten dependen. Kemudian dalam penginterpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang *substantive*. Selain melihat nilai *R-square*, pada model *Partial Least Square* (PLS) juga dievaluasi dengan melihat nilai *Q-square* prediktif relevansi untuk model konstruktif. *Q-square* mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameter. Nilai *Q-square* lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai *predictive relevance*, sedangkan apabila nilai *Q-square* kurang dari 0 (nol), maka menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*.

Pengujian *inner model* dengan *Partial Least Square* (PLS) pada penelitian ini menggunakan alat bantu *software Smart PLS ver. 3 for Windows*. Gambar model struktural (*inner model*) yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

Gambar 3.4 Model Struktural (*Inner Model*)



3.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Pengujian signifikansi dilakukan untuk mengetahui apakah variabel laten independen mempengaruhi variabel laten dependen, uji dilakukan dengan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel laten independen dengan uji t nilai signifikansi α () ditetapkan sebesar 5% (0,05) dan nilai t-tabel sebesar $\pm 1,96$ dengan uji hipotesis dua sisi, karena pengaruhnya bisa positif dan negatif. Kaidah keputusan jika nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$), maka variabel laten dikatakan signifikan dan menerima hipotesis, dan jika nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel ($t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$), maka variabel laten dikatakan tidak signifikan dan menolak hipotesis, selanjutnya dengan melihat koefisien analisis jalurnya (*path coefficient*). Signifikansi dapat juga dilakukan dengan membandingkan nilai α () dibandingkan dengan

probabilitas statistik t yang nilainya disebut juga nilai *p-value*, jika nilai *p-value* lebih kecil dari nilai *alpha* (α), ($p < \alpha$) berarti secara statistik variabel laten independen signifikan mempengaruhi variabel laten dependen, jika nilai *p-value* lebih besar dari nilai α (α), ($p > \alpha$) berarti secara statistik variabel laten independen tidak signifikan mempengaruhi variabel laten dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Asahan dengan responden yang mengisi kuesioner penelitian adalah seluruh Kepala Desa di Kabupaten Asahan. Jumlah populasi adalah 177 Desa dengan menggunakan metode *Simple Random Sampling* sehingga didapat sampel 54 Desa dengan responden sebanyak 108 orang sebagai sampel. Dimana yang menjadi responden adalah kepala desa atau sekretaris desa dan bendahara desa atau operator siskeudes. Kuesioner dibagikan kepada perangkat desa sebanyak 108 kuesioner, dan kuesioner yang kembali kepada panneliti dalam keadaan terisi seluruhnya sebanyak 100 kuesioner, sehingga data yang diinput adalah data dari 100 perangkat Desa di Kabupaten Asahan.

Berikut ini adalah penjelasan dalam bentuk tabel mengenai jumlah kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10 Pengumpulan Data

Keterangan	Responden	Persentase (%)	Institusi	Persentase (%)
Kuesioner yang dibagikan	108	100	54	100
Kuesioner yang kembali	100	92,59	54	100
Kuesioner yang tidak kembali	8	7,41	0	0

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, maka kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 yang dikembalikan oleh responden.

4.1.1.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, usia, masa kerja, dan tingkat pendidikan terakhir adalah sebagai berikut :

1) Jenis Kelamin

Tingkat persentase dari 100 responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.11 Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Pria	62	62
Wanita	38	38
Total	100	100

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, menggambarkan bahwa responden penelitian ini adalah mayoritas berjenis kelamin pria berjumlah 62 orang atau 62 %.

2) Usia

Tingkat persentase dari 100 responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.12 Deskripsi Responden berdasarkan Usia

Usia Responden	Jumlah	Persentase (%)
< 30 Tahun	36	36
31 Tahun – 40 Tahun	27	27
41 Tahun – 50 Tahun	20	20
> 50 Tahun	17	17
Total	100	100

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui responden yang berusia dibawah 30 tahun berjumlah 36 orang atau 36 %, responden yang berusia 31 – 40 tahun berjumlah 27 orang atau 27 %, responden yang berusia 41 – 50 tahun berjumlah 20 orang atau 20 %, dan responden yang berusia diatas 50 tahun berjumlah 17 orang atau 17 %.

3) Masa Kerja

Tingkat persentase dari 100 responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13 Deskripsi Responden berdasarkan Masa kerja

Lama Kerja	Jumlah	Persentase (%)
< 5 Tahun	33	33
5 Tahun - 10 Tahun	52	52
11 Tahun – 15 Tahun	12	12
< 15 Tahun Total	3	3
	100	100

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki masa kerja 5 tahun – 10 tahun, yaitu berjumlah 52 orang atau 52 %. Sedangkan untuk responden dengan masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 33 orang atau 33 %, masa kerja 11 tahun – 15 tahun sebanyak 12 orang atau 12 % dan dengan masa kerja lebih dari 15 tahun sebanyak 3 orang atau 3 %.

4) Tingkat Pendidikan Terakhir

Tingkat persentase dari 100 responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.14 Deskripsi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
SMA / Sederajat	12	12
D3 / AKADEMI	15	15
Strata1	73	73
Strata 2	0	0
Strata 3	0	0
Lain-lain	0	0
Total	100	100

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan terakhir Strata-I dengan jumlah 73 orang atau 73 %. Sedangkan untuk tingkat pendidikan terakhir terendah adalah SMA/Sederajat berjumlah 12 orang atau 12 %

4.1.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi setiap pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner akan menampilkan opsi dari setiap jawaban responden terhadap butir pertanyaan yang diberikan penulis kepada responden.

1) Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X)

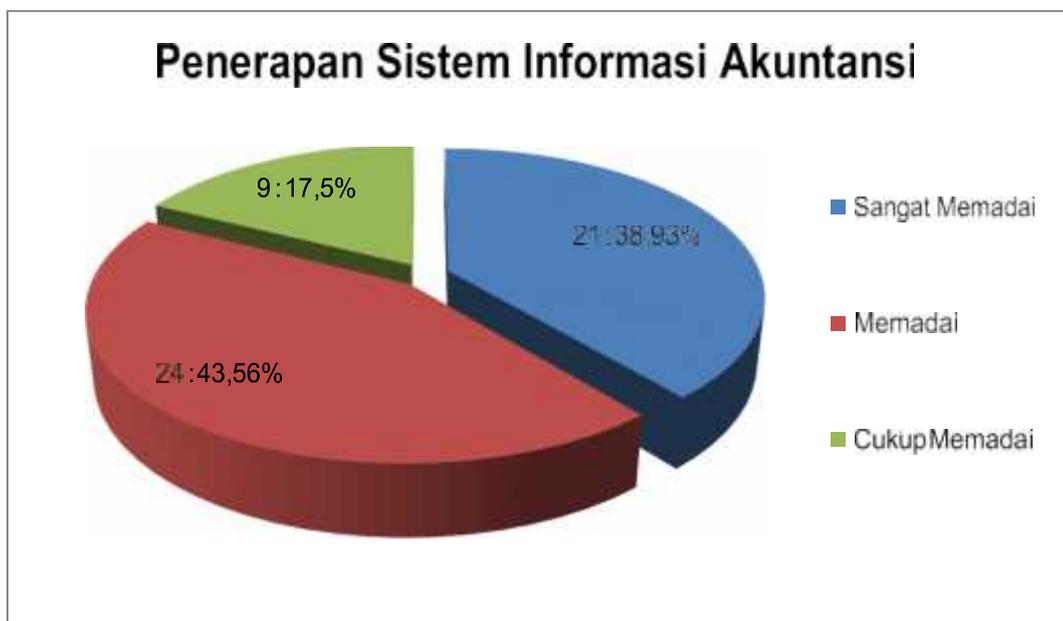
Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari variabel penerapan sistem informasi akuntansi yang dirangkum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.15
Penyajian Data Angket Variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X)

No.	Pertanyaan	F	Jawaban					Rata - rata	Kategori
		%	SM	M	CM	KM	TM		
1.	Siskeudes mudah digunakan dan sederhana	F	41	43	16	0	0	4,25	Memadai
		%	41	43	16	0	0		
2.	Keamanan data dan informasi yang tersimpan benar-benar aman	F	43	43	14	0	0	4,29	Memadai
		%	43	43	14	0	0		
3.	Siskeudes dapat diakses kapan saja	F	40	40	20	0	0	4,2	Memadai
		%	40	40	20	0	0		
4.	Siskeudes cepat dalam memproses data	F	36	50	14	0	0	4,22	Memadai
		%	36	50	14	0	0		
5.	Siskeudes memberikan informasi yang akurat	F	41	43	16	0	0	4,25	Memadai
		%	41	43	16	0	0		
6.	Siskeudes menyajikan informasi yang lengkap dan detail	F	43	40	17	0	0	4,26	Memadai
		%	43	40	17	0	0		
7.	Siskeudes menyajikan informasi yang mudah dimengerti	F	34	50	16	0	0	4,18	Memadai
		%	34	50	16	0	0		
8.	Siskeudes memberikan informasi yang tepat waktu	F	37	43	20	0	0	4,17	Memadai
		%	37	43	20	0	0		
9.	Desain tampilan pada Siskeudes memudahkan pengguna	F	45	35	20	0	0	4,25	Memadai
		%	45	35	20	0	0		
10.	Sangat mudah bagi pengguna untuk menjadi ahli dalam menggunakan Siskeudes	F	30	50	20	0	0	4,1	Memadai
		%	30	50	20	0	0		
11.	Siskeudes cepat merespon pengguna	F	29	51	20	0	0	4,09	Memadai
		%	29	51	20	0	0		
12.	Siskeudes tidak terbatas dalam merespon kebutuhan baru pengguna	F	40	43	17	0	0	4,23	Memadai
		%	40	43	17	0	0		
13.	Siskeudes dapat membantu pencarian informasi secara efisien	F	40	43	17	0	0	4,23	Memadai
		%	40	43	17	0	0		
14.	Siskeudes dapat membantu pengguna secara efektif	F	37	47	16	0	0	4,21	Memadai
		%	37	47	16	0	0		
15.	Kinerja Siskeudes memuaskan pengguna	F	44	36	20	0	0	4,24	Memadai
		%	44	36	20	0	0		
16.	Siskeudes tidak membosankan ketika digunakan	F	43	40	17	0	0	4,26	Memadai
		%	43	40	17	0	0		
Rata-rata		F	38.93	43.56	17.5	0	0	4,21	Memadai
		%	38.93	43.56	17.5	0	0		

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa rata-rata responden yang memilih sangat memadai atas pertanyaan yang ditanyakan sebanyak 38,93 %, dan 43,56 % untuk responden yang menjawab memadai, sedangkan rata-rata responden yang menjawab cukup memadai sebanyak 17,5 %. Grafik penerapan sistem informasi akuntansi pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Asahan disajikan pada gambar berikut.



Gambar 4.5 Grafik Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

Pada gambar diatas, dapat dilihat paling banyak Pemerintahan Desa di Kabupaten Asahan memiliki penerapan sistem informasi akuntansi yang memadai yaitu sebanyak 24 Pemerintahan Desa atau sebesar 43,56%, namun terdapat 21 Pemerintahan Desa di Kabupaten Asahan atau sebesar 38,93% memiliki penerapan sistem informasi akuntansi yang masuk dalam kategori sangat memadai, bahkan masih terdapat Pemerintahan Desa memiliki kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi cukup memadai sebanyak 9 Pemerintahan

Desa atau sebesar 17,5%. Hal ini menunjukkan bahwa Aplikasi Siskeudes mudah digunakan dan sederhana, dapat diakses kapan saja, cepat dalam memproses data, memberikan informasi yang akurat, menyajikan informasi yang lengkap dan detail, menyajikan informasi yang mudah dimengerti, Siskeudes memberikan informasi yang tepat waktu, cepat merespon pengguna, tidak terbatas dalam merespon kebutuhan baru pengguna, dapat membantu pencarian informasi secara efisien, dapat membantu pengguna secara efektif, sangat mudah bagi pengguna aplikasi untuk menjadi ahli dalam menggunakan Siskeudes, tidak membosankan ketika digunakan, kinerja Siskeudes memuaskan pengguna, serta keamanan data dan informasi yang tersimpan benar-benar aman.

2) Sistem Pengendalian Intern (Z)

Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari variabel penerapan sistem pengendalian intern yang dirangkum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.16 Penyajian Data Angket Variabel Sistem Pengendalian Intern (Z)

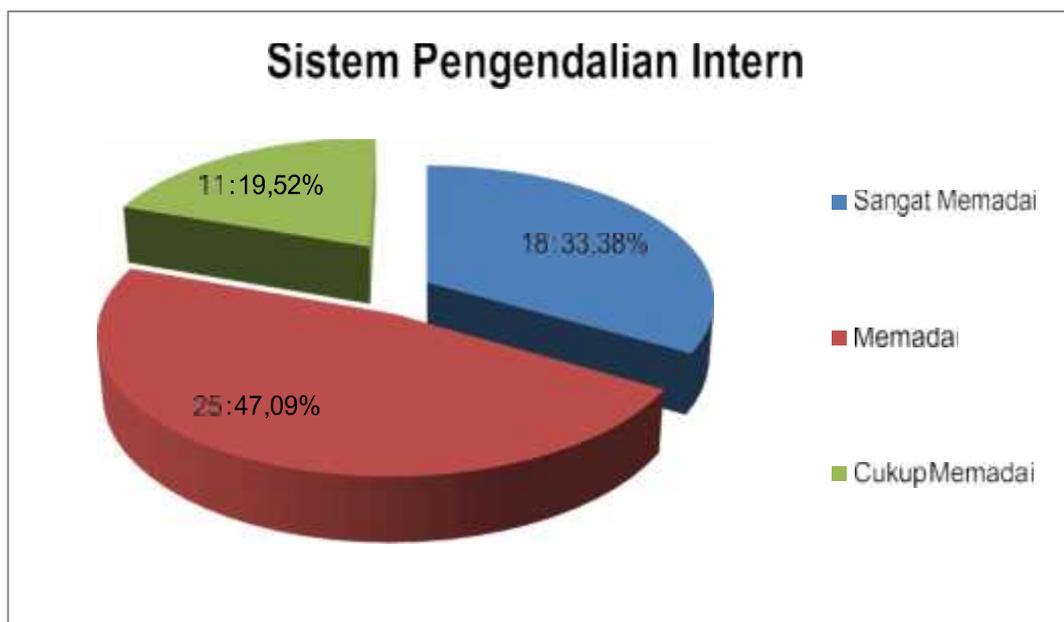
No.	Pertanyaan	F	Jawaban					Rata - rata	Kategori
		%	SM	M	CM	TM	TM		
1.	Pemerintah Desa telah memiliki kode etik yang komprehensif	F	38	42	20	0	0	4,18	Memadai
		%	38	42	20	0	0		
2.	Pemerintah Desa memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas mengenai suatu pekerjaan tertentu	F	33	47	20	0	0	4,13	Memadai
		%	33	47	20	0	0		
3.	Pemerintah Desa sudah memiliki unit yang menjalankan fungsi akuntansi	F	33	44	23	0	0	4,1	Memadai
		%	33	44	23	0	0		
4.	Struktur organisasi yang dimiliki Pemerintah Desa sudah lengkap	F	33	50	17	0	0	4,16	Memadai
		%	33	50	17	0	0		
5.	Pemerintah Desa memiliki SOP, baik dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah maupun operasional sehari-hari	F	33	50	17	0	0	4,16	Memadai
		%	33	50	17	0	0		
6.	Pemerintah Desa melakukan identifikasi resiko	F	34	46	20	0	0	4,14	Memadai
		%	34	46	20	0	0		
7.	Identifikasi resiko sudah	F	38	50	12	0	0	4,26	Memadai

	ditetapkan dalam bentuk dokumen	%	38	50	12	0	0		
8.	Pemerintah Desa sudah menganalisis resiko	F	36	50	14	0	0	4,22	Memadai
		%	36	50	14	0	0		
9.	Ada upaya untuk mengatasi dan meminimalisasi resiko	F	33	50	17	0	0	4,16	Memadai
		%	33	50	17	0	0		
10.	Ada regulasi untuk mengatasi resiko	F	36	44	20	0	0	4,16	Memadai
		%	36	44	20	0	0		
11.	Ada mekanisme untuk mereview kinerja	F	22	53	25	0	0	3,97	Memadai
		%	22	53	25	0	0		
12.	Terdapat dokumen untuk mereviuw kinerja	F	36	50	14	0	0	4,22	Memadai
		%	36	50	14	0	0		
13.	Setiap transaksi dicatat memadai	F	30	50	20	0	0	4,1	Memadai
		%	30	50	20	0	0		
14.	Terdapat pemisahan tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan	F	23	43	34	0	0	3,89	Memadai
		%	23	43	34	0	0		
15.	Terdapat mekanisme penyediaan informasi yang memadai	F	33	47	20	0	0	4,13	Memadai
		%	33	47	20	0	0		
16.	Pimpinan mendukung pengembangan sistem informasi melalui komitmen terhadap sumber daya yang memadai	F	36	44	20	0	0	4,16	Memadai
		%	36	44	20	0	0		
17.	Tugas dan tanggungjawab dikomunikasikan melalui media yang memadai	F	26	44	30	0	0	3,96	Memadai
		%	26	44	30	0	0		
18.	Terdapat saluran komunikasi bagi setiap orang untuk melaporkan adanya penyimpangan	F	41	38	21	0	0	4,2	Memadai
		%	41	38	21	0	0		
19.	Pemerintah Desa memiliki unit kerja yang melakukan pemantauan atas pelaksanaan seluruh kegiatan	F	40	47	13	0	0	4,27	Memadai
		%	40	47	13	0	0		
20.	Data yang dicatat oleh sistem informasi maupun keuangan telah dibandingkan secara periodik dengan fisiknya	F	34	50	16	0	0	4,18	Memadai
		%	34	50	16	0	0		
21.	Terdapat bukti telah dilakukannya fungsi pengendalian seperti review penyerapan anggaran dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	F	33	50	17	0	0	4,16	Memadai
		%	33	50	17	0	0		
Rata-rata		F	33.38	47.09	19.52	0	0	4,13	Memadai
		%	33.38	47.09	19.52	0	0		

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa rata-rata responden yang memilih sangat memadai atas pertanyaan yang ditanyakan sebanyak 33,38 %, dan

untuk responden yang menjawab memadai sebanyak 47,09 %, sedangkan rata-rata responden responden yang menjawab cukup memadai ratresponden yang responden yang menjawab cukup memadai sebanyak 19,52 %. Grafik sistem pengendalian intern pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Asahan disajikan pada gambar berikut.



Gambar 4.6 Grafik Sistem Pengendalian Intern

Pada gambar diatas, dapat dilihat paling banyak Pemerintah Desa di Kabupaten Asahan memiliki sistem pengendalian intern yang memadai sebanyak 25 Desa atau sebesar 47,09%, namun terdapat 18 Pemerintahan Desa di Kabupaten Asahan atau sebesar 33,38% memiliki sistem pengendalian intern yang masuk dalam kategori sangat memadai, bahkan masih terdapat Pemerintah Desa memiliki sistem pengendalian intern cukup memadai sebanyak 11 Pemerintahan Desa atau sebesar 19,52%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa telah memiliki kode etik yang komprehensif, memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas mengenai suatu pekerjaan tertentu, sudah memiliki unit yang

menjalankan fungsi akuntansi, struktur organisasi yang dimiliki Pemerintah Desa sudah lengkap, memiliki SOP baik dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah maupun operasional sehari-hari, Pemerintah Desa melakukan identifikasi resiko, Identifikasi resiko sudah ditetapkan dalam bentuk dokumen, sudah menganalisis resiko, ada upaya untuk mengatasi dan meminimalisasi resiko, ada regulasi untuk mengatasi resiko, ada mekanisme untuk mereview kinerja, terdapat dokumen untuk mereviuw kinerja, setiap transaksi dicatat memadai, terdapat pemisahan tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan, terdapat mekanisme penyediaan informasi yang memadai, kepala desa mendukung pengembangan sistem informasi melalui komitmen terhadap sumber daya yang memadai, tugas dan tanggungjawab dikomunikasikan melalui media yang memadai, terdapat saluran komunikasi bagi setiap orang untuk melaporkan adanya penyimpangan, Pemerintah Desa memiliki unit kerja yang melakukan pemantauan atas pelaksanaan seluruh kegiatan, data yang dicatat oleh sistem informasi maupun keuangan telah dibandingkan secara periodik dengan fisiknya serta terdapat bukti telah dilakukannya fungsi pengendalian seperti review penyerapan anggaran dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

3) Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari variabel penerapan kualitas laporan keuangan yang dirangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.17 Penyajian Data Angket Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

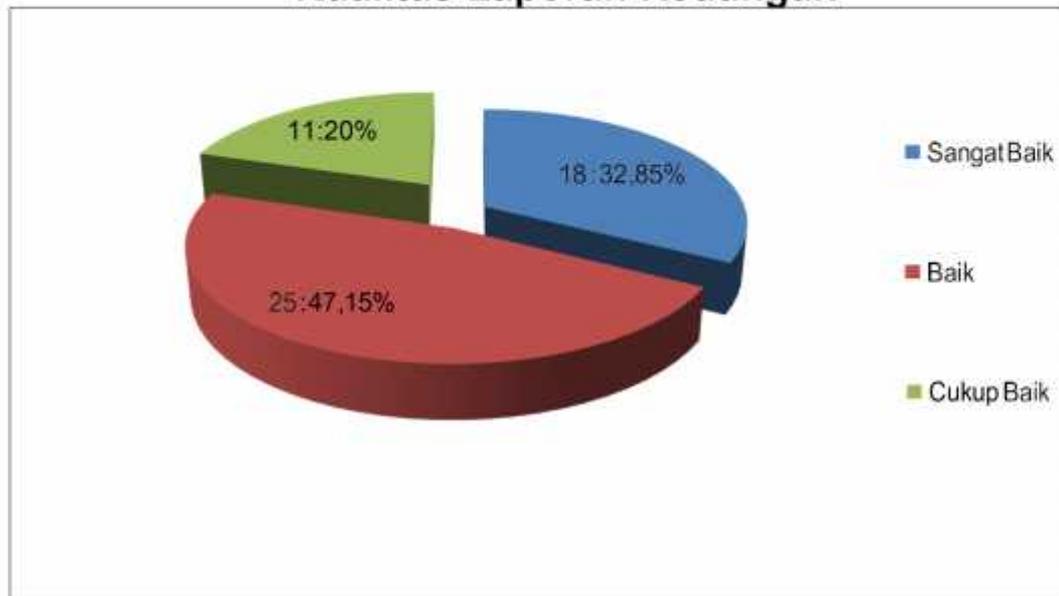
No.	Pertanyaan	F	Jawaban					Rata - rata	Kategori
		%	SB	B	CB	KB	TB		
1.	Review yang diperoleh dari Dinas PMD mencerminkan keandalan laporan keuangan Desa	F	26	47	27	0	0	3,99	Baik
		%	26	47	27	0	0		

2.	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa telah sesuai dengan SAP	F	29	47	24	0	0	4,05	Baik
		%	29	47	24	0	0		
3.	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya	F	30	47	23	0	0	4,07	Baik
		%	30	47	23	0	0		
4.	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan	F	39	44	17	0	0	4,22	Baik
		%	39	44	17	0	0		
5.	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan bebas dari kesalahan yang bersifat material	F	33	47	20	0	0	4,13	Baik
		%	33	47	20	0	0		
6.	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke Dinas PMD adalah sangat penting untuk menjamin kualitas laporan keuangan	F	37	51	12	0	0	4,25	Baik
		%	37	51	12	0	0		
7.	Laporan keuangan yang disampaikan ke Dinas PMD mencerminkan keandalan laporan keuangan Desa	F	36	47	17	0	0	4,19	Baik
		%	36	47	17	0	0		
Rata-rata		F	32.85	47.15	20	0	0	4,12	Baik
		%	32.85	47.15	20	0	0		

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa rata-rata responden yang memilih sangat baik atas pertanyaan yang ditanyakan sebanyak 32,85 %, dan untuk responden yang menjawab memadai sebanyak 47,15 %, sedangkan rata-rata responden yang menjawab cukup memadai sebanyak 20 %. Grafik kualitas laporan keuangan pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Asahan disajikan pada gambar berikut.

Kualitas Laporan Keuangan



Gambar 4.6 Grafik Kualitas Laporan Keuangan

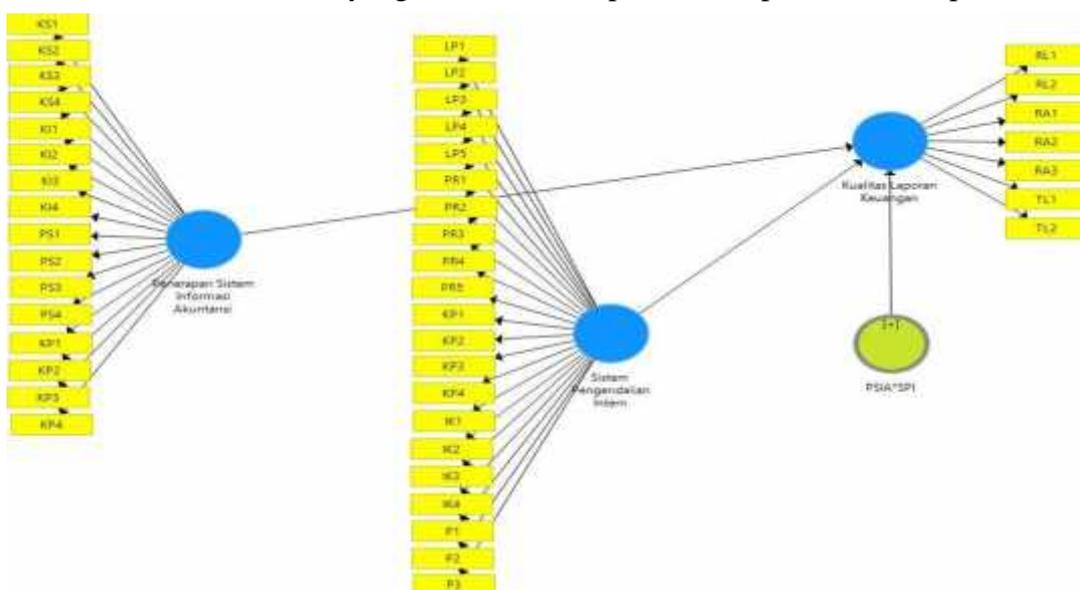
Pada gambar diatas, dapat dilihat paling banyak Pemerintah Desa di Kabupaten Asahan memiliki kualitas laporan keuangan yang baik sebanyak 25 Desa atau sebesar 47,15%, namun terdapat 18 Pemerintahan Desa di Kabupaten Asahan atau sebesar 32,85% memiliki kualitas laporan keuangan yang masuk dalam kategori sangat baik, bahkan masih terdapat Pemerintah Desa memiliki kualitas laporan keuangan cukup baik sebanyak 11 Pemerintahan Desa atau sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa Review yang diperoleh dari Dinas PMD mencerminkan keandalan laporan keuangan Desa, laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa telah sesuai dengan SAP, informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya, informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan bebas dari kesalahan yang bersifat material, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke Dinas PMD adalah sangat penting untuk menjamin kualitas laporan keuangan, serta laporan keuangan yang disampaikan ke Dinas PMD mencerminkan keandalan laporan keuangan Desa.

4.1.2 Uji Persyaratan Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disajikan tersebut, maka data kualitatif dari kuesioner tersebut dijadikan data dalam bentuk data kuantitatif berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Data kuantitatif tersebut merupakan data mentah dari masing-masing variabel pada penelitian ini. Data yang telah dideskripsikan sebelumnya merupakan deskripsi data yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah menggunakan *Structural Equation Model Partial Least Square* (SEM-PLS).

Pendekatan *variance based* atau *component based* dengan PLS berorientasi analisis bergeser dari pengujian model kausalitas/teori ke *component based predictive model* sebagai alternatif *covariance based Structural Equation Model* (SEM) (Ghozali, 2014). Pengujian model struktural dalam *Partial Least Square* (PLS) dilakukan menggunakan bantuan *software Smart PLS ver. 3 for Windows*.

Model struktural yang dibentuk dari perumusan permasalahan penelitian



Gambar 4.8 Model Struktural PLS

Ada dua tahapan kelompok untuk menganalisis *Structural Equation Model Partial Least Square* (SEM-PLS) yaitu dengan analisis model pengukuran (*outer model*) yang terdiri dari (a) uji validitas dengan validitas konvergen (*convergent validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*) serta analisis model struktural (*inner model*) yang terdiri dari (a) koefisien determinasi (*r-square*); (b) *f-square*; dan (c) pengujian hipotesis (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014).

4.1.2.1 Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

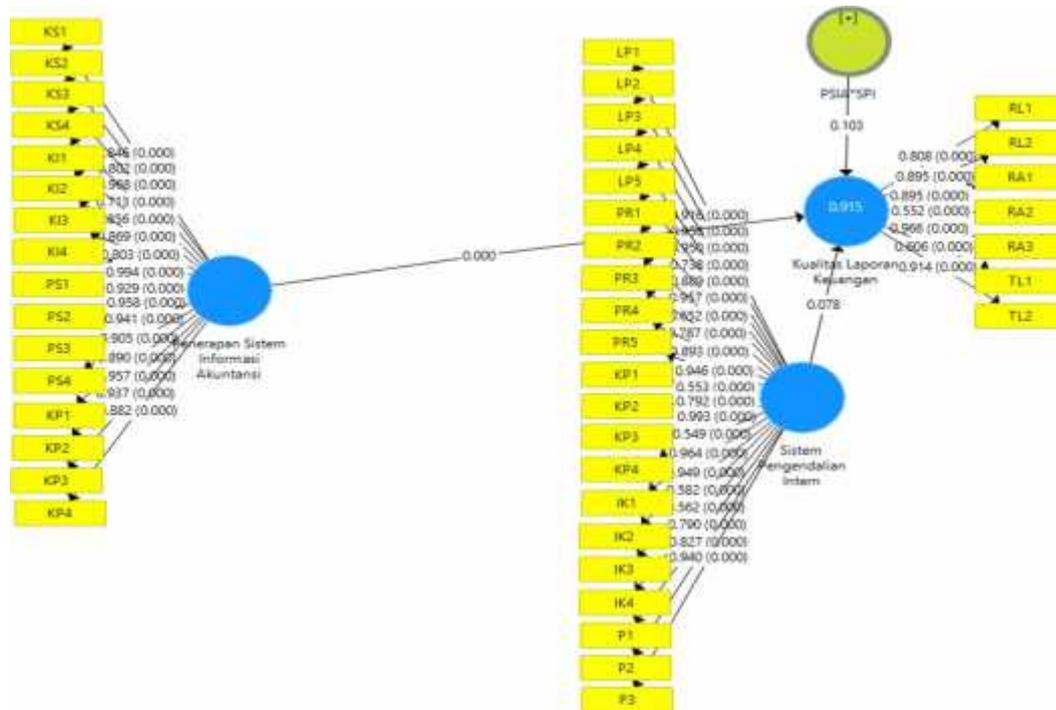
Analisis model struktural bertujuan untuk menanalisis hipotesis dengan menunjukkan hubungan struktural antar variabel. Dalam penelitian ini, pengujian analisis dilakukan dengan koefisien determinasi *r-square*, *f-square* dan pengujian hipotesis.

1) Koefisien Determinasi (*r-square*)

Koefisien Determinasi (*r-square*) menjelaskan seberapa jauh variabel yang dipengaruhi (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhi (eksogen) yang akan memprediksi baik atau buruknya model tersebut. *R-square* bernilai antara 0 sampai 1 dengan ketentuan semakin mendekati angka satu maka semakin baik. Hasil *r-square* untuk variabel endogen diatas 0,25 atau 25 % mengindikasikan bahwa model tersebut adalah lemah (buruk), diatas 0,50 atau 50 % mengindikasikan bahwa model tersebut adalah moderat (sedang), sedangkan nilai *r-square* diatas 0,75 atau 70 % mengindikasikan bahwa model tersebut adalah substansial (baik). Nilai *r-square* pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.18 *r-square*

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T Statistic</i>	<i>P Values</i>
Kualitas Laporan Keuangan	0,915	0,921	0,015	61,992	0,000

Gambar 4.9. *Output r-square*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pengaruh X dan Z terhadap Y dengan nilai *r-square* 0,915 mengindikasikan bahwa variasi variabel Y dapat dijelaskan oleh variasi nilai X dan Z sebesar 91,5 % atau dapat dikatakan bahwa model tersebut adalah substantial (baik) dan 8,5 % dipengaruhi oleh variabel lain. Nilai probabilitas (*p-values*) yang diperoleh adalah $0,000 < 0,005$ (signifikan), maka model tersebut tergolong baik.

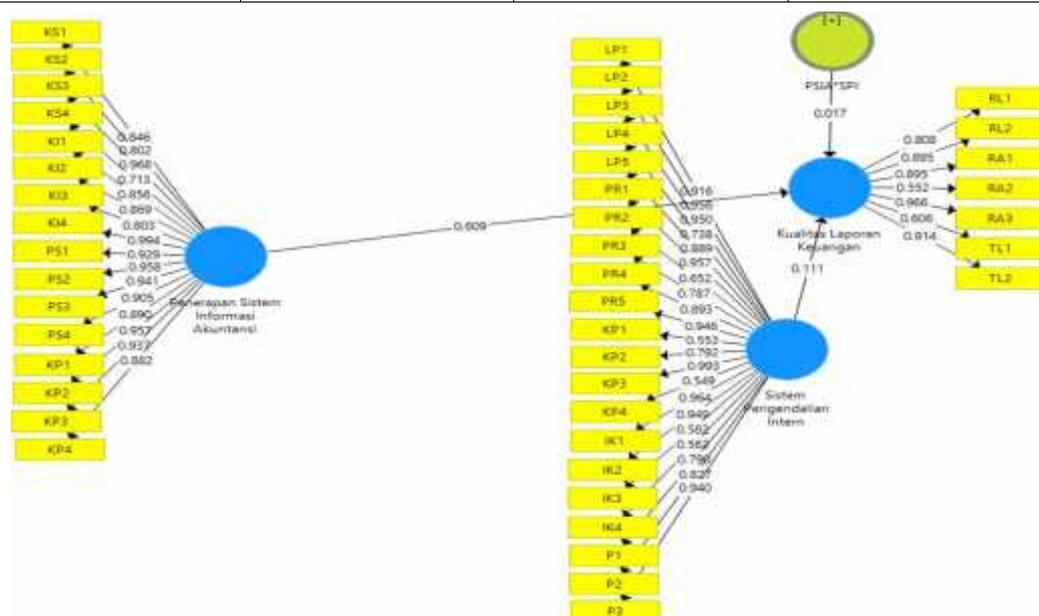
2) *F-square*

f-square dilakukan untuk mengetahui kebaikan model dengan menilai dampak relatif dari variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Kriteria pengukurannya adalah jika nilai f^2 sebesar

0,02 dapat dikategorikan terdapat pengaruh yang lemah (kecil) dari variabel eksogen terhadap variabel endogen, nilai f^2 sebesar 0,15 dapat dikategorikan terdapat pengaruh yang moderat (sedang) dari variabel eksogen terhadap variabel endogen, dan nilai f^2 sebesar 0,35 dapat dikategorikan terdapat pengaruh yang kuat (besar) dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nilai f -square pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.19 f -square

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation</i>
X Y	0,609	0,700	0,409
X*Z Y	0,017	0,024	0,027



Gambar 4.10 Output f -square

Berdasarkan tabel berikut, diketahui bahwa pengujian r -square sebagai berikut :

- Pengaruh variabel penerapan sistem informasi akuntansi terhadap variabel kualitas laporan keuangan sebesar 0,609 mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang kuat (besar).

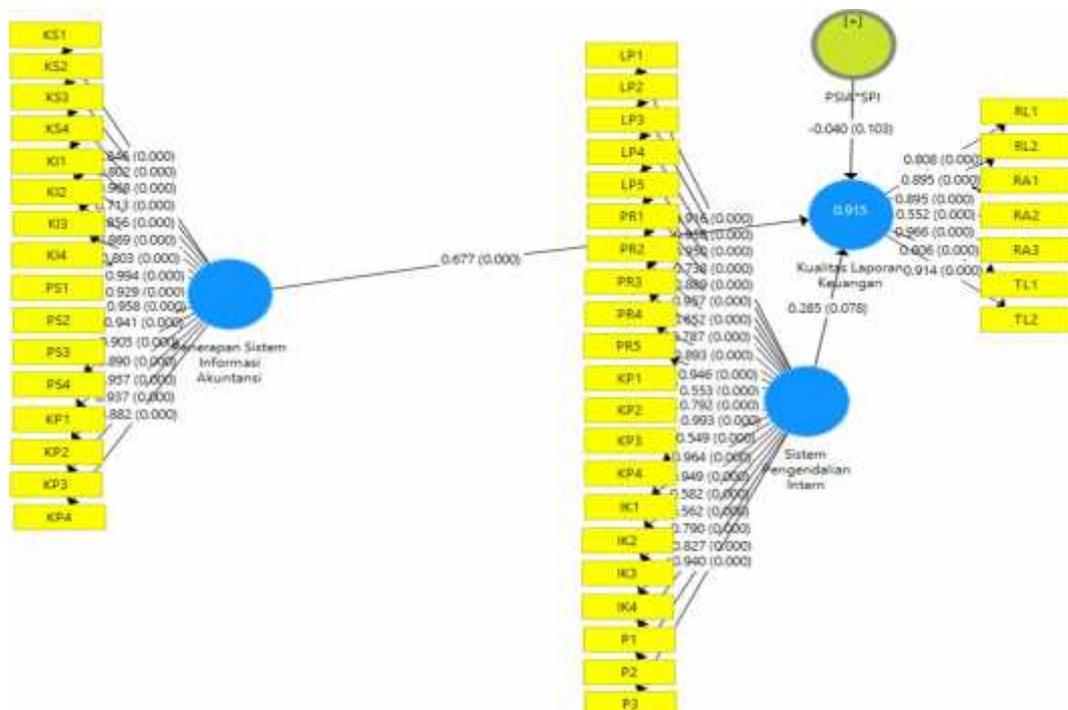
- b) Pengaruh variabel sistem pengendalian intern yang memoderasi variabel penerapan sistem informasi akuntansi terhadap variabel kualitas laporan keuangan mempunyai koefisien jalur sebesar 0,017 mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang lemah (kecil).

4.1.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian pada penelitian ini adalah dengan pengujian signifikansi semua hubungan atau pengujian hipotesis yang bertujuan untuk menentukan koefisien jalur dari model struktural. Berikut ini adalah tabel hasil pengujian hipotesis.

Tabel 4.20 Path Coefficient

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T Statistic</i>	<i>P Values</i>
X Y	0,677	0,656	0,155	4,358	0,000
X*Z Y	-0,040	-0,036	0,025	1,617	0,106



Gambar 4.11 Output Path Coefficient

Berdasarkan tabel berikut, diketahui bahwa pengujian hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

- 1) Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan mempunyai koefisien jalur sebesar 0,677. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat penerapan sistem informasi akuntansi, maka semakin efektif kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (*p-values*) sebesar $0,000 < 0,05$ (signifikan), berarti pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap terhadap kualitas laporan keuangan adalah signifikan.
- 2) Kemampuan sistem pengendalian intern dalam memoderasi pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan yang mempunyai koefisien jalur sebesar -0,040 dan mempunyai nilai probabilitas (*p-values*) sebesar $0,106 > 0,05$ (tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak signifikan dalam mempengaruhi hubungan antara penerapan sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan. Maka variabel sistem pengendalian intern tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis, maka didapat pembahasan sebagai berikut :

4.2.1 Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dinilai dengan koefisien jalur sebesar 0,677. Nilai probabilitas (*p-values*) yang didapat sebesar $0,000 < 0,05$ adalah signifikan. Sistem informasi akuntansi yang digunakan pemerintah desa adalah aplikasi Siskeudes. Maka pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi (Siskeudes) terhadap kualitas laporan keuangan adalah signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi, maka kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa yang disajikan akan lebih baik. Sistem informasi akuntansi (Siskeudes) yang baik, akan menyajikan informasi yang mudah dimengerti sehingga mencerminkan keandalan laporan keuangan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan sistem informasi akuntansi (siskeudes), maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Pemerintah Desa semakin baik.

Hasil penelitian ini menjawab identifikasi masalah bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan desa belum diterapkan secara optimal nyatanya tidak sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan penerapan sistem informasi akuntansi yang dilakukan pemerintah desa sudah memadai.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa. Pada objek penelitian, terdapat satu butir pertanyaan yang memperoleh nilai tertinggi untuk jawaban Siskeudes cepat merespon pengguna dan diikuti oleh tiga butir pertanyaan yang juga memperoleh nilai tertinggi untuk Siskeudes cepat dalam memproses data, Siskeudes menyajikan informasi yang mudah dimengerti, sangat mudah bagi pengguna untuk menjadi ahli dalam menggunakan Siskeudes. Dalam hal ini dapat dijadikan prediksi bahwa jika semakin tinggi tingkat penerapan sistem informasi akuntansi, maka semakin efektif kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa. Nilai yang signifikan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat penerapan sistem informasi akuntansi adalah nyata dan berpengaruh besar kontribusinya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Feriyanto (2014) menyatakan bahwa kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang secara langsung menentukan perubahan pada Kualitas Laporan Keuangan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rusmayanti (2014) bahwa sistem pengelolaan keuangan desa akan menjadikan pemerintah desa menjadi lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan desa serta pendokumentasian akan menjadi lebih mudah karena jumlah berkas yang efisien serta manfaat data yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pengimplementasian berbagai regulasi dibidang pengelolaan keuangan desa, sistem informasi pengelolaan keuangan desa sebagai alat terpadu yang dijadikan alat bantu pemerintah desa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2018) menyatakan bahwa keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Laporan keuangan yang belum memenuhi syarat karena penerapan sistem informasi akuntansi yang belum berhasil disebabkan oleh kualitas layanan yang disediakan oleh sistem tidak optimal, sistem informasi keuangan daerah (SIKD) di Kabupaten dan Kota masih belum memberikan kepuasan kepada pengguna, dapat diandalkan atau belum terintegrasi secara memadai.

4.2.2 Kemampuan Sistem Pengendalian Intern dalam memoderasi pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian, dinyatakan bahwa kemampuan sistem pengendalian intern dalam memoderasi pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan berpengaruh secara negatif yang dinilai dengan koefisien jalur sebesar $-0,040$. Nilai probabilitas (*p-values*) yang didapat sebesar $0,106 > 0,05$ adalah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak signifikan dalam mempengaruhi hubungan antara penerapan sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan. Maka variabel sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil

penelitian ini menjawab identifikasi masalah bahwa minimnya sistem pengendalian intern yang dilakukan pemerintah desa nyatanya tidak dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena sistem pengendalian intern pada Pemerintah Desa di Kabupaten Asahan belum diterapkan secara efektif sehingga tidak meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sistem informasi akuntansi pada Pemerintah Desa yang sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah akan lebih memberikan kepercayaan kepada pengguna laporan keuangan. Penerapan sistem informasi akuntansi pada Pemerintah Desa dengan didukung pengendalian intern yang baik, maka akan membuat laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tepat waktu. Walaupun pada kenyataannya sistem pengendalian intern dalam aplikasi siskeudes yang telah ditetapkan sudah bagus, namun belum diterapkan secara baik oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Asahan menyebabkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan kurang tepat. Hal tersebut dapat terlihat dari jawaban responden mengenai adanya mekanisme untuk mereview kinerja yang mayoritas menjawab memadai dan merupakan nilai tertinggi dari butir pertanyaan yang lain. Responden yang menjawab dengan nilai terendah adalah terdapat saluran komunikasi bagi setiap orang untuk melaporkan adanya penyimpangan dan Pemerintah Desa telah memiliki kode etik yang komprehensif serta terdapat pemisahan tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan. Hal ini kemungkinan dikarenakan dengan adanya sistem pengendalian intern membuat operator siskeudes menjadi sangat fokus dan teliti dalam penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan. Dalam hal tertentu, ketika mengejar keakuratan atau keandalan untuk mencapai kebermanfaatan informasi

laporan keuangan harus dibarengi dengan mengorbankan kualitas lain yaitu ketepatan waktu dari laporan keuangan tersebut. Pemerintah Desa belum membentuk sistem pengendalian internal Desa seperti amanat Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan hasil pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap masyarakat. Pengungkapan laporan keuangan Desa digunakan masyarakat untuk memberikan penilaian atas hasil kinerja aparatur desa serta sebagai media dalam menunjukkan transparansi dan akuntabilitas segala informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Dalam rangka membangun penerapan sistem informasi akuntansi yang berkualitas maka diperlukan sistem pengendalian intern. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diperlukan untuk menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP menyatakan bahwa, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai sehingga memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal yang baik akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Demi mendorong peningkatan kualitas dan inisiatif, menghindari biaya yang tidak seharusnya dan menghasilkan respon yang cepat terhadap perubahan keadaan dibutuhkan pengendalian intern yang menyatu dalam infrastruktur.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yendrawati

(2013) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan tidak terbukti. Walaupun sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan sudah bagus, tetapi belum diterapkan secara efektif menyebabkan informasi laporan keuangan yang dihasilkan kurang tepat.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Drama (2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Dengan demikian, jika sistem pengendalian intern pada SKPD Pemda Kota Solok baik dalam artian unsur-unsur dari SPI (lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern), dijalankan dengan maksimal, maka akan tercipta kualitas informasi keuangan yang baik pula.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suarmika, dkk. (2016) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak memoderasi pengaruh penerapan SIKD pada kualitas LKPD Kabupaten Karangasem. Hal ini disebabkan karena sistem pengendalian intern merupakan bagian yang terintegrasi dengan SIKD. Ketidakmampuan sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh penerapan SIKD daerah pada kualitas LKPD Kabupaten Karangasem dapat dijustifikasi melalui penilaian pejabat Pemerintah Kabupaten Karangasem terhadap sistem pengendalian intern.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Berdasarkan r square yang diperoleh bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini berarti sistem pengendalian intern pemerintah kemungkinan tidak akan menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan efisien. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam sistem pengendalian intern pemerintah hanya dimensi penilaian risiko saja yang tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan, dan satu-satunya dimensi keandalan tidak dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintahan. Hal ini disebabkan karena lebih dominan responden yang menjawab setuju dibandingkan yang menjawab sangat setuju.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan pemoderasi sistem pengendalian intern pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat penerapan sistem informasi akuntansi, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Pemerintah Desa di Kabupaten Asahan semakin baik.
2. Sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi pengaruh antara penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak signifikan dalam mempengaruhi hubungan antara penerapan sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan. Maka variabel sistem pengendalian intern tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Berarti sistem pengendalian intern tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebaiknya perlu ada pemisahan tugas dan fungsi yang jelas bagi perangkat desa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal tersebut dapat terwujud dengan aplikasi Siskeudes yang dapat diakses kapan saja, Siskeudes dapat menyajikan informasi yang lengkap dan detail, desain tampilan pada Siskeudes memudahkan pengguna, dan kinerja Siskeudes memuaskan para penggunanya. Berdasarkan butir pertanyaan dengan jawaban terendah yaitu keamanan data dan informasi yang tersimpan benar-benar aman. Penerapan sistem informasi akuntansi harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Asahan harus diterapkan secara lebih baik lagi karena sistem pengendalian yang lebih baik akan meminimalkan kemungkinan kepala desa atau perangkat desa untuk berbuat yang tidak sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Untuk mewujudkan efektivitas sistem pengendalian intern adalah dengan memiliki kode etik yang komprehensif pada pemerintah desa, ada regulasi untuk mengatasi resiko, terdapat pemisahan tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan, terdapat saluran komunikasi bagi setiap orang untuk melaporkan adanya penyimpangan, pemerintah desa memiliki unit kerja yang melakukan pemantauan atas pelaksanaan seluruh kegiatan.
3. Diharapkan kepada peneliti lain agar dapat memperluas variabel penelitian

tidak hanya terbatas pada tiga variabel melainkan lebih dari tiga variabel seperti kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dll. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat memperpanjang waktu penelitian maupun mengambil atau memperbanyak sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, O. R., & Surjono, W. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan),2(1),49.
<https://doi.org/10.32897/sikap.v2i1.64>
- Albrecht, W. Steve; Stice, Earl K.; Stice, James D. and Swain, Monter A 2008 *Accounting, Concept and Application*. Thomson South Western.
- Arens,Alvin.A, Elder,Randal.J dan Beasley,Mark S. 2014. *Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach*. Fifthen Edition. Pearson Education , Inc
- Ayu, G., Sulina, T., Wahyuni, M. A., & Kurniawan, P. S. (2017). *Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba , Kecamatan Kediri , Kabupaten Tabanan)* e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Azhar Susanto. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi: Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan*. UNPAD Bandung. Linggar Jaya.
- Bahl, Roy W. (1999). *Intergovernmental Transfer in Developing and Transition Countries: Principles and Practice, Draft*, January 19, 1999.
- COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Internal Control*). 2013, *Integrated Framework. Guidance on Monitoring Internal Control Systems*, Introduction.
- DeLone W.H. dan McLean E.R. 1992. “*Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable*”. *Information Systems Research*, 3(1):60 90.
- DeLone, William H. dan McLean, Ephraim R. 2003. *The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update*, *Journal of Management Information Systems*. Volume 19, No. 4, pp. 9–30
- Doyle, Jeffrey T., Ge, Weili.,dan McVay, Sarah,.2007. *Accruals Quality and Internal Control over Financial Reporting*. *The Accounting Review* Vol. 82 No. 5 pp. 1141–1170
- Drama, H. (2014). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel Intervening*. *Ejournal.unp.ac.id*
- Eko, S. (2014). *Desa membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

- Elder, Randal J., Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens. 2012. *Auditing and Assurance Services An Integrated Approach*, Fourteenth Edition, Pearson Prentice Hall, London
- Feriyanto, O. (2014). *Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan*. *STAR-Study & Accounting Research*, XI(3), 8-17.
- Gayatri, & Latrini, M. Y. (2018). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 35–39.
- Gelinas, J.U., Dull, Richard B., Wheeler, Patrick R. 2012. *Accounting Information Systems*. South Western: Cengage Learning
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ketiga)*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guan (2010) Guan, Yuhong . 2010. *A Study on The Internal control of accounting Information System*. International Conference on Computer and Communication Technologies in Agriculture Engineering, Volume 2
- Hall, James A. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 4. Terjemahan Dewi Fitriyani. 2010. Jakarta: Salemba Empat
- Herawati, T. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. *STAR – Study & Accounting Research*, 9(1), 49. <https://doi.org/10.32897/sikap.v2i1.64>
- Hoesada, J. (2014). Komite standar akuntansi pemerintah (KSAP). Jakarta
- I Gusti Agung Rai. 2010. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Iceman and Hilton. 1990. *Distribution of audited detected Errors Partitioned by Internal control*, *Journal of Accounting, Auditing & Finance* vol. 5 no. 4 527-543
- Indra Bastian. 2011. *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ismadani. (2015). *Optimalkan Amanat Undang-Undang Desa*. http://www.kompasiana.com/ismadani/optimalikan-amanat-undang-undangdesa_55924b99b17a61a10ee27b77
- Jones .Federick L. & Rama, Dasaratha V. 2003. *Accounting Information System; A business Process Approach*, Thomson Learning, South Western

- Kesuma, Indra., Nadirsyah., dan Darwanis., “*Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Auditor Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)*”, *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* pp. 73- 82, ISSN 2302-0164, Volume 3, No. 1, Februari 2014.
- Laudon, Kenneth C. & Laudon, Jane P. 2012. *Management Information Systems - Managing The Digital Firm*. 12th Edition. Perason Prentice Hall
- Livari, Juhani. 2005. *An Empirical Test of The DeLone and McLean Model of Information System Success, Database for Advances in Information System*. Spring 2005
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). *Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 578–583. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21514.2018>
- Mc.Leod, R., & Schell, G. P. 2007. *Management Information Systems (10th ed)*. New Jersey: Pearson Education.
- McGill, Tanya, Hobbs, Valerie & Klobas, Jane. 2003. *User-Developed Application and Information System Success: a Test of DeLone and McLean’s Model*. *Information Resource Management Journal*, 16(1): 24-45, Jan-Mar 2003.
- Millichamp, Alan dan Taylor, John . 2008. *Auditing*, 9th Edition, Sourth Western, Cengage Learning
- Nordiawan, Deddi., Iswahyudi Sondi Putra., dan Maulidah Rahmawati., “*Akuntansi Pemerintahan*”, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- O’Brien, James A. dan Marakas, George M. 2010. *Introduction to Information Systems*. 15th Edition. McGrew-Hill Irwin
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
- Pradono, F. C., & Basukianto. (2015). *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada Skpd Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)*, 22(2), 188–200.
- Rahmawati, M., & Fajar, C. M. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung*. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63–76.

- Republik Indonesia 2008. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
- Risadi, A. A. (2015). *Undang-Undang Desa: Harapan Baru Masyarakat Desa*. [https:// www.kompasiana.com](https://www.kompasiana.com)
- Rusmayanti, A. (2014). *Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pada Desa Ngadirejan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pada Desa Ngadirejan*, 6(2), 35–39.
- Ruth W. Benjamin Bae, dan Susan S. Gwathmey. 2003. *Internal Control Issues: The Case of Changes to Information Processes*, Information System Control Journal, Volume 4. Information Systems Audit and Control Association www.isaca.org
- Sandanafu, S. P. (2016). *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Study Empiris Pada Pemerintah Provinsi Maluku)*. Jurnal Maneksi, 5(2), 44–51.
- Sari, E. N. (2018). *The Successful Implementasi Of Accounting Information Systems And The Quality Of Government Financial Statements At Regencies And Cities In North Sumatra, Indonesia* (pp. 346–352). pp. 346–352.
- Sari, Maya (2019). *The Effect Of The Government Of Internal Control System On The Quality Of Financial Statements In The Coal Regency Village Office*. Journal International Conference on Innovation of Small Medium- sized Enterprise (ICIS). Volume 1 No. 1 Hal. 134 – 144.
- Septiawan, B. (2018). *Keberhasilan Implementasi Sistem E-Procurement Jurnal pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Kajian Akuntansi, 2(1), 23-40.
- Setyowati, L. (2016). *Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. ESENSI, 6(1), 45–62. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3120>

- Suarmika & Suputra (2016). *Kemampuan Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Kapasitas Sdm dan Penerapan SIKD pada Kualitas LKPD Kabupaten Karangasem*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.9 Hal. 2921-2950
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tanjung, Abdul Hafidz., “Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual Pendekatan Teknis Sesuai PP No.71/2010”. Alfabeta, Bandung, 2013
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Nomor 5495. Jakarta
- Wahyuni, N. S., Muhyarsyah, & Sari, E. N. (2019). *The Influence Of The Government’s Internal Control System And The Availability Of Budgets On The Quality Of Financial Statement (Case Study in local governments in North Sumatra)*. Multi-Disciplinary International Conference University Of Asahan2019, (1), 660–670.
- Widjaja, HAW. (2005). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Wilkinson, Joseph W. 1996. *Accounting Information System : essential concepts and applications*. John Wiley & Sons Inc
- Yendrawati, R. (2013). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Faktor Eksternal sebagai Variabel Moderating*. JAAI. Volume 17 No.2 Hal. 166-175.
- Yuliani, Syafrida. 2010. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)*. Jurnal telaah dan riset akuntansi Vol 3 No 2 hal 206-220.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : WINDI TRIANA
Tempat/Tanggal Lahir : Hessa Air Genting, 17 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

Nama Orang Tua

Ayah : JUMARI
Alamat : Dusun I Desa Air Genting
Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan
Ibu : GINA
Alamat : Dusun III Desa Hessa Air Genting
Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan

B. Pendidikan

SDN 010050 Simpang Kawat Tahun 2008
SMPN 1 Simpang Empat Tahun 2011
SMK Swasta YAPIM Simpang Kawat Tahun 2014
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan Tahun 2018
Kuliah pada Prodi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2018 hingga sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan seperlunya.

Hormat Saya,

WINDI TRIANA

FORM A

KUESIONER PENELITIAN

No. : ____

KATA PENGANTAR

Kepada Yth. :

Bapak/Ibu

- 1. Kepala Desa di Kabupaten Asahan**
- 2. Dinas PMD Kabupaten Asahan**

di-

Tempat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengumpulan data yang akan dilakukan dalam rangka penyusunan Tesis Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di bawah bimbingan Ibu Dr. Eka Nurmalasari, M.Si. Ak, CA dan Dr. Prawidya Hariani, SE, M.Si dengan judul penelitian: **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Pemoderasi Sistem Pengendalian Intern Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Asahan”**, dengan ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner terlampir.

Atas bantuan serta kerjasama yang diberikan oleh Bapak dan Ibu untuk pengisian kuesioner ini, saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Saya,

Windi Triana

FORM B**IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama : (boleh tidak diisi)
 2. Usia :
 3. Jenis Kelamin : Pria Wanita
 4. Pendidikan Terakhir : S-1 S-2 S-3
 5. Masa Kerja : < 5 Thn 5-10 Thn 10-15 Thn >15 Thn
 6. Jabatan saat ini :
 7. Lama menjabat :
-

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Pengisian kuesioner ini semata-mata untuk tujuan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, oleh sebab itu semua pilihan jawaban dan pendapat yang Bapak/Ibu berikan akan menjadi kerahasiaan oleh peneliti.
2. Bapak/Ibu dapat memilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan Bapak/Ibu dengan cara memberikan tanda silang (X) pada kolom jawaban yang telah disediakan. Setiap pernyataan diberikan 5 (lima) buah alternatif jawaban, dengan kriteria sebagai berikut :

- SM	: Sangat Memadai	- SB	: Sangat Baik
- M	: Memadai	- B	: Baik
- CM	: Cukup Memadai	- CB	: Cukup Baik
- KM	: Kurang Memadai	- KB	: Kurang Baik
- TM	: Tidak Memadai	- TB	: Tidak Baik
3. Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian jawaban dan akan melakukan perubahan jawaban, maka dapat mencoret dengan garis dua (===) pada jawaban semula dan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang baru.

FORM C**INFORMASI UMUM**

1. Komputer yang digunakan dalam mengerjakan tugas sehari-hari di lingkungan kerja adalah :

<i>Personal Computer</i> khusus yang disediakan hanya untuk Bapak/Ibu	
<i>Personal Computer</i> yang digunakan secara bersama dan bergantian dengan personal lainnya	
Lainnya (sebutkan, jika ada)	

2. Program aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang Bapak/Ibu gunakan saat ini :

Nama Program Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang digunakan Pemerintah Desa Bapak/Ibu : SISKEUDES	
Dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Desa	
Dikembangkan oleh instansi di luar instansi Pemerintah Desa Bapak/Ibu	
Menyewa aplikasi dari pihak luar (<i>outsourcing</i>)	
Lainnya (sebutkan, jika ada)	

3. Usia program aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang saat ini digunakan

Kurang dari 1 tahun	
Sudah digunakan selama 1 – 3 tahun	
Sudah digunakan selama 3 – 5 tahun	
Sudah digunakan selama > 5 tahun	

4. Infrastruktur teknologi informasi yang digunakan untuk menunjang kelancaran penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (dapat diberikan jawaban lebih dari satu, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia) :

<i>WiFi</i>	
Jaringan internet khusus	
UPS	
Ruang khusus untuk aplikasi SISKEUDES	
Petugas khusus layanan (<i>helpdesk</i>) yang memberikan pelayanan setiap saat jika terjadi pemeliharaan dan perbaikan program SIKD	
Lainnya (sebutkan jika ada)	

5. Pengadaan, pemeliharaan, perbaikan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan fasilitas yang digunakan :

Dilakukan sendiri oleh instansi Bapak/Ibu	
Dilakukan secara sentralisasi oleh Perangkat Desa yang khusus menangani tentang Teknologi Informasi	
Dilakukan oleh jasa yang disediakan pihak luar instansi	
Lainnya (sebutkan, jika ada)	

FORM D

KUESIONER PENELITIAN

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi						
Kualitas Sistem		TM	KM	CM	M	SM
1.	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mudah digunakan dan sederhana					
2.	Keamanan data dan informasi yang tersimpan benar-benar aman					
3.	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat diakses kapan saja					
4.	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mudah dipelajari					
5.	Belum pernah terjadi kerusakan pada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)					
6.	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) cepat dalam memproses data					
Kualitas Informasi		TM	KM	CM	M	SM
7.	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memberikan informasi yang akurat					
8.	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memberikan informasi yang bebas dari kesalahan					
9.	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menyajikan informasi yang lengkap dan detail					
10.	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menyajikan informasi yang mudah dimengerti					
11.	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memberikan informasi tepat waktu					
12.	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memberikan informasi yang up-to-date					
13.	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menyajikan informasi yang relevan					
Penggunaan System		TM	KM	CM	M	SM
14.	Desain tampilan pada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memudahkan pengguna					
15.	Sangat mudah bagi pengguna untuk menjadi ahli dalam menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)					
16.	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) cepat merespon pengguna					
17.	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tidak terbatas dalam merespon kebutuhan baru pengguna					
Kepuasan Pemakai		TM	KM	CM	M	SM
18.	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat membantu pencarian informasi secara efisien					
19.	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat membantu pengguna secara efektif					
20.	Kinerja Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memuaskan pengguna					
21.	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tidak membosankan ketika digunakan					
22.	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sangat bagus					
23.	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mudah digunakan					

SISTEM PENGENDALIAN INTERN						
Lingkungan Pengendalian		TM	KM	CM	M	SM
1	Pemerintah Desa telah memiliki kode etik yang komprehensif.					
2	Tindakan disiplin atau sanksi atas pelanggaran disampaikan kepada instansi yang mengurus masalah kepegawaian					
3	Pemerintah Desa memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas					

	mengenai suatu pekerjaan tertentu					
4	Pemerintah Desa memiliki ketentuan yang jelas mengenai kapan seorang pegawai dapat memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi					
5	Pemerintah Desa memandang penting fungsi pengolahan data, fungsi akuntansi, keandalan laporan keuangan dan perlindungan terhadap asset/barang					
6	Pemerintah Desa sudah memiliki unit yang menjalankan fungsi akuntansi.					
7	Struktur organisasi yang dimiliki Pemerintah Desa sudah lengkap					
8	Pemerintah Desa memiliki Standar Operasional dan Prosedur, baik dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah maupun operasional sehari-hari					
9	Pemerintah Desa memiliki ketentuan yang jelas mengenai sanksi atas pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur yang ada					
Penilaian Risiko		TM	KM	CM	M	SM
10	Pemerintah Desa melakukan identifikasi risiko					
11	Identifikasi risiko sudah ditetapkan dalam bentuk dokumen					
12	Pemerintah Desa sudah menganalisis risiko					
13	Kinerja ditetapkan berbasis manajemen risiko					
14	Ada upaya untuk mengatasi dan meminimalisasi risiko					
15	Ada regulasi untuk mengatasi resiko					
Kegiatan Pengendalian		TM	KM	CM	M	SM
16	Ada mekanisme untuk mereview kinerja					
17	Terdapat dokumen untuk mereview kinerja					
18	Setiap transaksi dicatat secara memadai					
19	Pelaporan asset dilakukan secara berkala					
20	Terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan					
21	Transaksi yang diakui hanya transaksi yang valid yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Desa					
22	Pencatatan dan dokumentasi dilakukan secara lengkap dan akurat dan memungkinkan dilakukannya penelusuran					
Informasi dan Komunikasi		TM	KM	CM	M	SM
23	Terdapat mekanisme penyediaan informasi yang memadai					
24	Pimpinan mendukung pengembangan sistem informasi melalui komitmen terhadap sumber daya yang memadai					
25	Tugas dan tanggung jawab dikomunikasikan melalui media yang memadai					
26	Terdapat saluran komunikasi bagi setiap orang untuk melaporkan adanya penyimpangan					
Pemantauan		TM	KM	CM	M	SM
27	Pemerintah Desa memiliki unit kerja yang melakukan pemantauan atas pelaksanaan seluruh kegiatan					
28	Data yang dicatat oleh sistem informasi maupun keuangan telah dibandingkan secara periodik dengan fisiknya					
29	Terdapat bukti telah dilakukannya fungsi pengendalian seperti review penyerapan anggaran dan tindak lanjut hasil pemeriksaan					

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN						
Relevan		TB	KB	CB	B	SB
1	Review yang diperoleh dari Dinas PMD mencerminkan keandalan laporan keuangan Desa					
2	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan					
Reliable (Andal)		TB	KB	CB	B	SB
3	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan telah					

	menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya					
4	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan					
5	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan bebas dari kesalahan yang bersifat material					
Timeliness		TB	KB	CB	B	SB
6	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke Dinas PMD adalah sangat penting untuk menjamin kualitas laporan keuangan					
7	Laporan keuangan yang disampaikan ke Dinas PMD mencerminkan keandalan laporan keuangan Desa					

Hasil Pengolahan Data menggunakan Smart PLS

